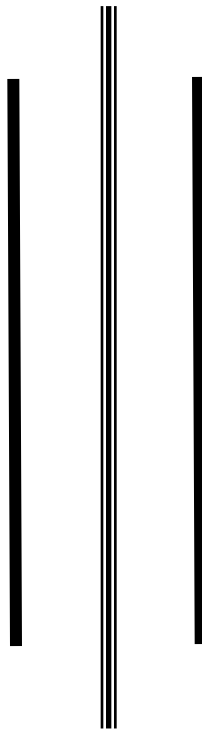


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TIMUR  
RESOR SAMPANG

---



# RENCANA KERJA KEPOLISIAN RESOR SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2026



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMPANG  
NOMOR: KEP/64/ X /2025, 29 OKTOBER 2025





KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMPANG

Nomor: Kep/64/X/2025

tentang

RENCANA KERJA KEPOLISIAN RESOR SAMPANG TA 2026

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMPANG

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Polres Sampang TA 2026 maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  5. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;

8. Peraturan.....

8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
9. Rancangan Rencana Kerja (Rarenja) Polres Sampang TA 2026;
10. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Sampang TA 2024;
11. Kalender Kamtibmas TA 2026;
12. Perkiraan Intelijen Polres Sampang tahun 2026 tanggal 23 Oktober 2025.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Kepala Kepolisian Resor Sampang Nomor: Kep/14/1/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Rencana Kerja Polres Sampang TA 2025;
  2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2024-2029;
  3. Peraturan Bupati Sampang Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang Tahun 2026;
  4. Rencana Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

#### MEMUTUSKAN

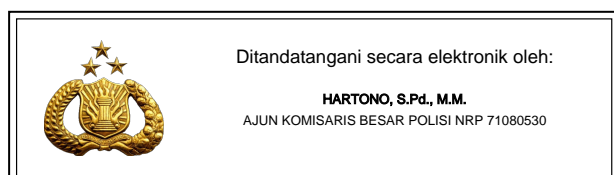
- Menetapkan :
1. Mengesahkan Rencana Kerja Polres Sampang TA 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
  2. Rencana Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Sampang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran masing-masing satuan kerja;
  3. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sampang  
pada tanggal: 29 Oktober 2025

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMPANG POLDA JATIM

Tembusan:

1. Kapolda Jatim.
2. Irwasda Polda Jatim.
3. Karorena Polda Jatim



## DAFTAR ISI

	Halaman
Keputusan Kapolres Sampang	-
DAFTAR ISI.....	i
I. Latar Belakang.....	1
1. Kondisi Umum.....	1
a. Perkembangan Aspek Kehidupan .....	11
b. Analisis .....	28
2. Identifikasi Masalah.....	34
II. Tujuan dan Sasaran .....	37
1. Visi dan Misi.....	37
a. Visi dan Misi Polda Jatim.....	37
b. Visi dan Misi Polres Sampang.....	37
2. Tujuan Jangka Menengah.....	47
a. Tujuan Jangka Menengah Polda Jatim.....	38
b. Tujuan Jangka Menengah Polres Sampang.....	38
3. Sasaran Prioritas.....	49
a. Sasaran Prioritas Polda Jatim.....	39
b. Sasaran Prioritas Polres Sampang .....	40
III. Arah Kebijakan Polda Jatim dan Polres Sampang Tahun 2026 .....	41
1. Arah Kebijakan Polda Jatim Tahun 2026.....	41
2. Arah Kebijakan Polres Sampang Tahun 2026 .....	65
IV. Program, Kegiatan, dan Pagu Indikatif Polres Sampang TA 2026 .....	84
1. Program dan Kegiatan Polres Sampang. ....	84
2. Pagu Indikatif Polres Sampang TA 2026 .....	85
V. Penutup.....	89
Lampiran I: RENCANA KERJA TAHUNAN POLRES SAMPANG TAHUN 2026	
Lampiran II: RENCANA KERJAKEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN 2026	





**RENCANA KERJA  
KEPOLISIAN RESOR SAMPANG  
TAHUN ANGGARAN 2026**

---

**BAB I  
LATAR BELAKANG**

**1. Kondisi Umum**

Tahun 2026 merupakan tahun Ke-2 (dua) dari tahapan Rencana Strategis Polres Sampang 2025-2029 dan sebagai kelanjutannya dari Rencana Kerja Polres Sampang TA 2025 sehingga perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Polres Sampang TA 2026.

Rencana Kerja Polres Sampang TA 2026 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Polda Jatim 2025-2029 dan Rencana Strategis Polres Sampang 2025-2029. Rencana Kerja Polres Sampang TA 2026 disusun dengan memperhatikan RPJMN pada Renstra Polres Sampang 2025-2029, yaitu: (1) Pemeliharaan Keamanan dan Keertiban Masyarakat Kabupaten Sampang Yang Responsif dan Prediktif; (2) Penegakan Hukum Yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan di Wilayah Hukum Polres Sampang; (3) Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polres Sampang yang Kompeten, Berintegritas, dan Adaptif Secara Terpadu dan Optimal; (4) Infrastruktur Strategis Polres Sampang yang Berdaya Guna dan Modern; (5) Tata Kelola Yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel di Lingkungan Polres Sampang.

Hal tersebut di atas sebagai penuntasan target prioritas nasional RPJMN 2025-2029 mengingat tahun 2026 adalah tahun kedua dari RPJMN 2025-2029 sebagai kelanjutan dari *roadmap* Visi Indonesia 2025-2045.

Pelaksanaan tugas Polres Sampang telah mencapai keberhasilan yang cukup baik dengan ditandai banyaknya pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan kepolisian kepada Masyarakat Kab. Sampang. Seluruh keberhasilan Polres

Sampang.....

Sampang dalam pengungkapan kasus-kasus khususnya kejahatan Konvensional dan Kejahatan Transnasional lainnya dinilai cukup baik dan mendapat apresiasi yang Positif dari Masyarakat Kab. Sampang, sehingga dapat mendukung kelancaran pembangunan daerah walaupun masih ditemukan adanya komplain masyarakat terkait pelayanan publik Polres Sampang. Keberhasilan yang dicapai oleh Polres Sampang tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polres Sampang dengan didukung oleh eksekutif, legislatif, yudikatif dan partisipasi masyarakat serta berbagai *stakeholders* yang terkait dengan tugas kepolisian. Sejauh ini apresiasi yang positif atau kritik terhadap kinerja Polres Sampang oleh pemerintah/swasta/masyarakat akan dijadikan tantangan bagi Polres Sampang dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya guna mencapai keberhasilan yang lebih baik pada masa mendatang. Keberhasilan yang diraih Polres Sampang diharapkan dapat membuat Polres Sampang semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai tantangan dimasa mendatang. Tantangan tersebut berupa adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun pemerintah kepada Polres Sampang untuk dapat senantiasa terus menerus secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang kepolisian.

Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan langkah penting yang dilakukan untuk memahami keadaan dan kondisi di lingkungan Polres Sampang. Lingkungan terus mengalami perubahan yang dinamis sehingga Polres Sampang diharapkan dapat memenuhi tantangan yang ada baik dari internal maupun eksternal. Oleh karenanya, pemetaan potensi dan permasalahan untuk dapat merumuskan sasaran Prioritas Polres Sampang selama 1 (Satu) tahun ke depan akan menjadi dasar dalam pengembangan yang tepat dan perolehan hasil yang maksimal. Pengembangan yang dilakukan dengan sebaik-baiknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah Sampang. Potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Polres Sampang pada Tahun 2026 dibagi menjadi beberapa antara lain :

**a. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Potensi :**

- 1) Koordinasi yang baik dari semua pilar untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam menghadapi pilihan politik/preferensi politik yang beragam;
- 2) Kerjasama dengan berbagai elemen, kelompok, dan organisasi masyarakat.....

masyarakat seperti ponpes, keaktifan siskamling dan peningkatan peran kepala desa;

- 3) Kecepatan dalam merespon kejadian termasuk kehadiran di TKP;
- 4) Peran aktif personil bhabinkamtibmas dan babinsa dalam bersosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga kamtibmas;
- 5) Dukungan terhadap sarana dan prasarana berupa penyediaan kendaraan dan pembangunan akses jalan untuk menunjang tugas polisi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban;
- 6) Sinergi Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan masyarakat dalam menjaga dan mewujudkan kamtibmas;
- 7) Peningkatan pengawasan khususnya di daerah-daerah perbatasan guna mereduksi gangguan nyata;
- 8) Sinergitas polri dan kelompok nelayan di Sampang dalam meningkatkan kamtibmas di wilayah Sampang. Melalui hubungan baik antara nelayan di Sampang dapat menciptakan kondisi kondusif dan mengantisipasi gangguan;
- 9) Mengintensifkan pengamanan jalur perairan (pulau mandaging) di wilayah Sampang melalui peningkatan patroli laut dalam mengantisipasi tindak kejahatan wilayah perairan laut.

**Permasalahan :**

- 1) Pertumbuhan penduduk dunia yang telah mencapai 7.2 miliar jiwa. Penduduk Indonesia yang sangat heterogen terdiri dari berbagai macam Suku, Agama, dan Ras (SARA) tidak terkecuali penduduk di Kabupaten Sampang. Komposisi penduduk di Kabupaten Sampang yang multikultur dan multi agama menyimpan kerawanan konflik antar kelompok tersebut jika hubungan antar kelompok tersebut tidak dikelola dengan baik;
- 2) Tantangan industrialisasi juga menjadi sesuatu yang harus sangat dipikirkan mengingat lahan yang tersisa semakin tipis;
- 3) Paham ekstrimisme yang cenderung intoleran terhadap kepercayaan orang lain dan sangat mendorong orang untuk ikut percaya terhadap apa yang dianut dapat bereskalasi menjadi Violent Ekstremisme sehingga menjadi masalah ketika tidak didampingi kesiapan dalam mengatasi

permasalahan

permasalahan yang muncul;

- 4) Masih terdapat individu/kelompok yang memiliki ideologinya sendiri namun tidak merujuk pada dasar Negara yaitu Pancasila;
- 5) Adanya individu/kelompok yang intoleran dalam menyikapi keanekaragaman budaya, adat istiadat, suku dan agama dapat memicu terjadinya konflik sosial dan bukan tidak mungkin dapat menjadi masalah Negara;
- 6) Perkembangan otonomi daerah, pemekaran wilayah, makin kritisnya masyarakat terhadap aktivitas sistem politik dan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, berakibat kepada status keamanan di suatu wilayah;
- 7) Struktur perekonomian secara spasial masih menghadapi ketimpangan ekonomi antar wilayah;
- 8) Perkembangan kondisi politik yang cukup pesat juga berdampak pada ketahanan sosial kaitannya dengan potensi konflik yang ditimbulkannya;
- 9) Pandemi merupakan epidemi yang terjadi pada skala yang melintasi batas internasional, biasanya memengaruhi sejumlah besar orang. Pandemi Covid 19 ini telah menyebabkan gangguan sosioekonomi global, berbagai penundaan atau pembatalan acara olahraga dan budaya, hingga karantina/*lockdown* kota di dunia;
- 10) Masih adanya beberapa bhabinkamtibmas yang tidak memiliki peralatan yang lengkap.

**b. Penegakan Hukum Potensi :**

- 1) Kejadian laka lantas yang menonjol sekarang sudah banyak jalan diperbaiki;
- 2) Pelaksanaan penegakan hukum khususnya pada kejahatan yang mendapat perhatian luas dari publik, salah satunya kasus narkoba;
- 3) Penyelesaian perkara yang memperhatikan transparansi dan HAM sehingga tidak terjadi diskriminatif;
- 4) Adanya upaya menghadirkan kehidupan yang demokratis, tengaknya supremasi hukum, dan perlindungan HAM dalam segala tugas dan implemetasi kerja Polisi.

permasalahan.....

**Permasalahan:**

- 1) Masih berlangsungnya 4 (empat) jenis kejahatan, yaitu kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontinjensi, memerlukan kemampuan Polres Sampang untuk mengungkap dan menanggulangi;
- 2) Pesatnya teknologi informasi dan telekomunikasi turut mendukung munculnya jenis-jenis kejahatan baru yang tidak diprediksi sebelumnya seperti penyebaran pornografi, pencemaran nama baik, penipuan dengan beraneka ragam modus operandi, atau perdagangan perempuan, baik melalui pesan singkat (short message service/SMS) maupun melalui jaringan internet;
- 3) Masih terjadinya gesekan/konflik antara Polres dengan penegak hukum lainnya dikarenakan adanya ego sektoral yang dapat berakibat menurunnya kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
- 4) Pengguna aktif sosial media rentan menjadi korban atas kejahatan siber yakni kejahatan berdimensi baru (*New Dimension Crime*) dan telah turut mewarnai aksi-aksi kejahatan di Indonesia;
- 5) Kerawanan Penyalahgunaan Senpi dan Handak secara ilegal dan tidak menutup kemungkinan penyelundupan yang berasal dari luar negeri. Keterbatasan dana operasional kendaraan patroli dan minimnya kesejahteraan anggota.

**c. Modernisasi Teknologi Potensi :**

- 1) Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sudah memiliki tanggung jawab internasional dalam mengamankan aliran laut kepulauan Indonesia. Karena itu, diperlukan sinergi dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan teknologi pengawasan di perairan;
- 2) Inovasi berbasis TIK atau *information communication technology* dalam pelayanan publik di Polres Sampang;
- 3) Pemanfaatan atas perkembangan teknologi seperti pemasangan cctv di sejumlah ruas jalan;
- 4) Memperkuat sistem IT dalam menyikapi perkembangan kejahatan dengan kecanggihan teknologi dalam melancarkan aksinya;

5) Pengelola:

- 5) Pengelolaan arsip untuk memudahkan menemukan informasi yang telah disimpan dalam bentuk Arsip Data Komputer (ADK);
- 6) Penguatan opini positif dan penguatan intelegensia media melalui roadshow dalam menghadapi perkembangan teknologi dan informasi;
- 7) Peran aktif anggota humas Polri dan netizen untuk berperan aktif dalam rangka pembentukan opini positif guna meng-counter semua informasi yang tidak benar di dunia maya;
- 8) Tersedianya Polsek *Online* untuk akses data dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat Polres sehingga informasi tetap *update*. Dimana pada pelaksanaannya, menggunakan dua akses, yaitu internet (jaringan terbuka) dan intranet (jaringan tertutup) menggunakan jaringan VPN IP (Virtual Private Network) yang hanya bisa diakses di internal Polri;
- 9) Pemantauan kejahatan dunia maya (Cyber Crime) dengan Polsek *Online*.

**Permasalahan :**

- 1) Pemanfaatan teknologi yang belum sepenuhnya optimal di Polres Sampang masih dapat lebih digali dan dimanfaatkan lebih dalam;
- 2) Belum terpenuhinya kebutuhan peralatan kebutuhan peralatan teknologi informasi;
- 3) Masih kurangnya sinergi antara masyarakat dan Polri dalam memerangi dan membentengi Sampang dari ancaman berita hoaks.

**d. Birokrasi dan Pelayanan Publik Potensi :**

- 1) Komitmen pimpinan yang tinggi untuk melakukan reformasi birokrasi;
- 2) Laporan kinerja instansi pemerintah yang dapat diukur dan terarah dalam kinerja yang dilakukannya;
- 3) Pelayanan publik yang semakin membaik dalam pelayanan SPKT, SKCK, SIM, STNK dan BPKB disertai keterbukaan dalam hal prosedur, biaya dan waktu;
- 4) Meningkatkan kualitas layanannya melalui mekanisme yang sistematis dan terstandarisasi;
- 5) Akuntabilitas sangat terkait dengan transparansi dimana membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan

dan

dan tidak diskriminatif Polres Sampang semakin meningkat.

**Permasalahan :**

- 1) Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja Polres Sampang sangat tinggi;
- 2) Birokrasi yang masih dirasa terlalu rumit dan menghambat proses pelayanan itu sendiri;
- 3) Beberapa informasi pelayanan publik belum secara jelas disampaikan kepada pengguna layanan;
- 4) Sistem, prosedur, target kinerja dan perangkat lunak lainnya seperti etika dan pedoman kerja perlu ditetapkan dan dilaksanakan dengan baik;
- 5) Beberapa data anggaran Satker yang masih sulit diakses oleh masyarakat yang memerlukan;

Implikasi strategis ini mendorong Polres Sampang untuk membangun kapasitas intelijen yang lebih kuat, tidak hanya dalam mendeteksi potensi ancaman, tetapi juga dalam menanggapi teror atau risiko keamanan lainnya secara tepat waktu dan efisien. Intelijen yang kuat adalah fondasi dari kemampuan Polres Sampang untuk menjadi lebih prediktif dan preventif dalam menjaga keamanan nasional. Lingkungan strategis baik global, regional dan nasional sangat mempengaruhi berkembangnya tantangan dan harapan yang dihadapi Polres Sampang. Lingkungan strategis tersebut semakin dinamis dan kompleks, dimana dunia menjadi tanpa batas dan semakin mudah terhubung seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang sangat cepat. Sehingga hal ini dapat mendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai yang saling mempengaruhi dan budaya bangsa yang positif berpotensi bisa berubah menjadi perilaku negatif seperti masih ditemukannya: eksklusifisme, materialisme, konsumerisme, hedonisme dan radikalisme dalam kehidupan masyarakat Kab Sampang.

Perubahan isu-isu pada lingkungan strategis global seperti : demokratisasi, paham radikalisme dan intoleransi, perlindungan hukum dan HAM, lingkungan hidup, pemanasan global, krisis energi, krisis keuangan global serta mobilitas arus informasi, barang, jasa dan manusia dari suatu negara ke negara lain sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya kejahatan

kejahatan lintas negara seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, kejahatan siber, judi *online*, penyelundupan manusia, Narkoba, penyelundupan barang dan senjata serta TPPO. Dalam perkembangan lingkungan strategis regional masih terdapat isu terkait dengan daerah perbatasan, baik di darat maupun laut, pencemaran lingkungan, pemberlakuan MEA, pengiriman TKI maupun penerimaan TKA, dan perkembangan paham radikalisme serta terorisme. Selanjutnya perkembangan lingkungan strategi nasional harus dilihat dari faktor- faktor Ipoleksosbud dan keamanan yang senantiasa bergerak dinamis dan senantiasa berubah di setiap daerah kabupaten atau Kota. Semua isu strategis baik Luar Negeri, regional dan Dalam Negeri tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Polres Sampang TA 2026.

Selanjutnya kondisi internal dan eksternal Polres Sampang yang dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis tersebut akan digambarkan sebagai berikut:

## **II. Kondisi Internal dan Eksternal Polres Sampang**

1. Situasi Kamtibmas di Wilayah Kab. Sampang sangat dipengaruhi oleh aspek Ipoleksosbudkam, Konfigurasi kerawanan diwarnai oleh bentuk – bentuk ancaman yang dapat mengganggu eksistensi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang dapat dikategorikan ancaman terhadap ideologi Pancasila, Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelangsungan pemerintahan dan ancaman terhadap masyarakat baik dari WNI maupun WNA yang kemungkinan sedang berada di wilayah Kab. Sampang;
2. Kabupaten Sampang menganut budaya keagamaan yang kental dengan ajaran Islam yang kuat. Masyarakatnya dikenal sangat religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi dan adat istiadat yang terintegrasi dengan ajaran Islam;
3. Pelaksanaan Pilkades serentak 180 Desa di Kab. Sampang sedianya akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sampang nomor: 188.45/272/KEP/434.013/2021, tanggal 30 Juni 2021, namun sepanjang 2025 pelaksanaan kegiatan tersebut belum terlaksana;
4. Program pemerintah *asta cita*, suatu istilah yang merujuk pada delapan cita-cita atau tujuan utama yang harus dicapai oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia berupa pemberian subsidi di bidang Pendidikan, Kesehatan dan program strategis lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesehatan anak didik, ibu hamil dsb, namun rentan terjadi penyimpangan atau penyelewengan dalam pelaksanaannya sehingga target yang dicapai belum maksimal;
5. Kegiatan.....

5. Kegiatan ekonomi dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam di Kab. Sampang dalam bentuk eksplorasi Migas dan proses seismik oleh perusahaan Migas PT. Medco, HCML dan Petronas, saat ini merupakan proses eksplorasi sehingga akan berpengaruh terhadap dinamika kegiatan ekonomi wilayah Kab. Sampang;
6. Pemanfaatan sumber kekayaan alam berupa kandungan minyak dan gas bumi wilayah perairan Jawa Timur di selat Madura yang masuk wilayah Provinsi dan wilayah Kab. Sampang yang dieksploitasi oleh investor baik dalam negeri maupun luar negeri sehingga berdampak meningkatnya perekonomian masyarakat di sekitar lokasi namun juga berpotensi menimbulkan kerawanan Kamtibmas khususnya nelayan wilayah Kec. Sampang, Camplong, Banyuates, Ketapang, Sokobanah dan Sreseh;
7. Kegiatan ekonomi rakyat Kab. Sampang yang bermata pencaharian sebagai Petani, nelayan, pedagang dipengaruhi oleh perubahan iklim yang ekstrim sehingga kebutuhan bahan pokok masih menggantungkan pada suplay dari luar Kab. Sampang seperti Sembako dan kebutuhan sekunder lainnya;
8. Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi ditandai dengan kepadatan penduduk menyebabkan meningkatnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan sehingga menjadi suatu kerawanan tersendiri. Dengan demikian tingkat sosial masyarakat dapat berpengaruh terhadap situasi Kamtibmas di wilayah Kab. Sampang dengan keterbatasan sarana dan prasarana dalam mengantisipasi gangguan Kamtibmas oleh orang asing maupun domestik.
9. Permasalahan indikasi terjadinya tindak pidana korupsi oleh Pejabat Pemerintah maupun perorangan penanganannya akan menjadi prioritas sedangkan kejahatan konvensional diperkirakan akan meningkat baik secara kuantitas / kualitas seiring kemajuan teknologi di era globalisasi serta beberapa kasus lain diantaranya: Curas, Curat, Curanmor, Curhewan, aniaya, Narkoba dll;
10. Pelanggaran lalu – lintas yang dilakukan oleh pengendara akan tetap tinggi hal ini didasarkan pada peningkatan jumlah kendaraan R2/R4 yang tidak diimbangi dengan peningkatan fasilitas jalan serta sikap pengguna jalan dalam mengendarai kendaraan yang tidak mematuhi hukum dan disiplin dalam berkendara;
11. Melaksanakan Program Presiden.  
  
17 Program Prioritas Presiden, diantaranya :
  - a. Mencapai Swasembada Pangan, Energi, Dan Air;
  - b. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara;
  - c. Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi;
  - d. Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi;
  - e. Pemberantasan Kemiskinan;
  - f. Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba;

g. Menjamin

- g. Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan Bagi Seluruh Rakyat; Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan Dan Penyediaan Obat Untuk Rakyat;
- h. Penguatan Pendidikan, Sains Dan Teknologi, Serta Digitalisasi;
- i. Penguatan Pertahanan Dan Keamanan Negara Dan Pemeliharaan Hubungan Internasional Yang Kondusif;
- j. Penguatan Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, Serta Penyandang Disabilitas;
- k. Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup;
- l. Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, Dan Pestisida Langsung Ke Petani;
- l. Menjamin Rumah Murah Dan Sanitasi Untuk Masyarakat Desa Dan Rakyat Yang Membutuhkan;
- m. Melanjutkan Pemerataan Ekonomi, Penguatan UMKM Dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
- n. Melanjutkan Hilirisasi Dan Industrialisasi Berbasis Sumber daya Alam (SDA) Dan Maritim Untuk Membuka Lapangan kerja Yang Seluas-Luasnya Dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi;
- o. Memastikan Kerukunan Antar Umat Beragama, Kebebasan Beribadah, Dan Perawatan Rumah Ibadah;
- p. Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, Dan Peningkatan Prestasi Olahraga.

12. Program Asta Cita diantaranya

- a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru;
- c. Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, Dan Melanjutkan Perkembangan Infrastruktur;
- d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas;
- e. Melanjutkan Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri;
- f. Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan kemiskinan;
- g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Dan Judi Online;
- h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang harmonis Dengan Lingkungan Alam Dan Budaya, Peningkatan Toleransi Umat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur.

13. 4 (empat) arah kebijakan utama “*Presisi*” mengakomodir kegiatan Program Prioritas Kapolri (*Polri Untuk Masyarakat*) yang terdiri dari:

a. Transformasi.....

- a. Transformasi Organisasi;
- b. Transformasi Operasional;
- c. Transformasi Pelayanan Publik;
- d. Transformasi Pengawasan.

14. 8 Program “*Quick Wins Presisi*” meliputi : Membangun Budaya Integritas Organisasi;

- a. Menerapkan Sistem Pemolisian Berbasis Digital;
- b. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Unggul;
- c. Menciptakan Suasana Kondusif di Masyarakat (*Cooling System*);
- d. Memantapkan Pemeliharaan Kamtibmas;
- e. Mengoptimalkan Penegakkan Hukum;
- f. Meningkatkan Pelayanan Publik;
- g. Mengoptimalkan Pengawasan.

15. Kegiatan Prioritas Polri diantaranya: penanggungjawab tingkat Mabes Polri:

- a. Kegiatan | Penanganan Laporan Masyarakat Terhadap anggota Polri;
- b. Kegiatan II Penanganan Terorisme, Radikalisme, Intoleransi;
- c. Kegiatan III Penanganan TPPO dan PPA serta Kelompok Rentan;
- d. Kegiatan IV Perburuan dan Penangkapan Bandar Narkoba dan Jejaringnya;
- e. Kegiatan V Penanganan Tindak Pidana Siber;
- f. Kegiatan VI Pelatihan SDM Unggul dan Berintegritas;
- g. Kegiatan VII Pengamanan Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar;
- h. Kegiatan VIII Penyelesaian Kasus Tindak Pidana di Wilayah Perairan Indonesia;
- i. Kegiatan IX Pengamanan Objek Vital dan Target Rentan;
- j. Kegiatan X Perburuan dan Penangkapan Kelompok Teroris Mujahidin Indonesia Timur dan Jejaring Terorisme.

## 1. Perkembangan aspek kehidupan masyarakat

### a. Umum.

- 1) Kabupaten Sampang merupakan satu bagian dari wilayah Provinsi Jawa timur ke 27 yang terletak pada posisi 6°5' -7°13' lintang selatan dan 113°39' bujur timur.  
Dilihat dari ketinggian wilayah Kabupaten Sampang berada pada 1.5 M – 118 M diatas permukaan air laut dan secara administrasi Kab. Sampang berbatasan dengan :
  - a) Sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa.
  - b) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan.
  - c) Sebelah barat berbatasan dengan Kab. Bangkalan.
  - d) Sebelah selatan berbatasan dengan selat Madura.

2)Secara

12 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES SAMPANG  
NOMOR : KEP /64/X/ 2025  
TANGGAL : 29 OKTOBER 2025

- 2) Secara Administratif Kab. Sampang dibagi menjadi 4 (Empat) wilayah pembantu Bupati 14 Kecamatan 180 desa dan 6 kelurahan dengan luas wilayah 1.233,30 KM<sup>2</sup>. Kecamatan Banyuates merupakan kecamatan terluas yaitu 141,23 KM<sup>2</sup> atau 11.45% dari luas Kab. Sampang dan Kecamatan Pangarengan merupakan kecamatan terkecil yaitu dengan luas 42,69 KM<sup>2</sup> atau 3,46% dari luas wilayah Kab. Sampang;
- 3) Keadaan geografis Kab. Sampang yang cukup luas dan berbatasan langsung dengan laut Jawa di sebelah utara dan selat Madura disebelah selatan serta adanya banyak sungai yang membawa pengaruh baik secara positif maupun negatif terhadap situasi Kamtibmas di Wilkum Polres Sampang sehingga memerlukan antisipasi aksi kriminalitas yang menggunakan jalur perairan seperti pencurian kekayaan laut, perompakan, penyelundupan, laka laut, bentrok antar nelayan terkait wilayah penangkapan dan alat tangkap ikan.
- 4). Lokasi Kab. Sampang yang berada di tengah Pulau Madura dan berada disebelah selatan garis Khatulistiwa maka Kab. Sampang mempunyai 2 (Dua) jenis perubahan iklim yaitu musim penghujan dan musim kemarau antara lain:
  - a) Musim penghujan diperkirakan mulai bulan Oktober 2025 sampai dengan bulan April 2026 dimana pada bulan Januari dan Februari biasanya curah hujan semakin tinggi dan berdampak pada banjir maupun tanah longsor.
  - b) Musim Kemarau diperkirakan pada bulan April 2026 sampai dengan bulan Oktober 2026 dimana biasanya pada bulan Agustus hingga Oktober beberapa daerah di Kab. Sampang mengalami kekeringan dan kesulitan mendapat air bersih.
  - c) Temperatur tinggi terjadi pada bulan Agustus/September yaitu mencapai 35,6°C dan terendah pada bulan juli yaitu 18,1°C dengan kelembaban sampai dengan 98 persen, mendung paling banyak terjadi dibulan Februari dan desember dengan rata-rata penyinaran matahari 52 dan 41,6%
  - d) Angin timur diperkirakan pada bulan Juni s/d Oktober sedang angin barat diperkirakan pada bulan Nopember s/d Mei.
- 5). Kab. Sampang memiliki daerah pesisir baik disebelah utara dan selatan yang berjarak ± 5 KM dari tepi pantai dan pada umumnya pantai kondisinya landai atau dangkal namun pada saat air laut pasang dapat digunakan pendaratan perahu motor seperti di:
  - a) Pelabuhan sungai Desa Nepa Kec. Banyuates.
  - b) Pelabuhan



- b) Pelabuhan Tanglok di Kel. Banyuanyar Kec. Sampang.
  - c) Pelabuhan Sungai Camplong di Ds. Dharma Camplong Kec. Camplong.
  - d) Pelabuhan Sungai Pangarengan di Desa / Kec. Pangarengan
  - e) Pelabuhan di Ds. Gulbung Kec. Pangarengan.
  - f) Pelabuhan sungai Sreseh di Ds. Sreseh Kec. Sreseh.
  - g) Pelabuhan di Ds. Marparan Kec. Sreseh.
  - h) Pelabuhan di Ds. Disanah Kec. Sreseh.
- 6). Data Jumlah Penduduk Kabupaten Sampang
- a) Jumlah penduduk Kab. Sampang 1.033.926 Jiwa jiwa, laki-laki 512.140 Jiwa, perempuan 521.786 jiwa. (sumber: Sampang Dalam Angka Tahun 2025)
  - b) Jumlah penduduk berdasarkan kelamin
    - (1) Laki-laki 512.140 jiwa
    - (2) Perempuan 521.786 jiwa
  - c) Jumlah penduduk berdasarkan kewarganegaraan
    - (1) WNI 1.033.926 jiwa (sumber: Sampang Dalam Angka Tahun 2025)
    - (2) WNA Nihil
  - d) Jumlah penduduk dan usia angkatan kerja potensial cukup tinggi namun tidak mendapatkan kesempatan kerja / usaha.
  - e) Mobilitas penduduk cukup tinggi.
  - f) Temperamen penduduk cukup tinggi.
  - g) Rasa solidaritasnya tinggi.

**1. Perkembangan lingkungan strategis Kab. Sampang dalam tahun 2026 dipengaruhi dengan :**

- a. Pasca Pilkada 2024 dan permasalahan pelaksanaan Pilkada serentak Th. 2026/2027 menimbulkan potensi kerawanan yang kompleks dimana masih terdapat beberapa masyarakat atau tokoh lawan politik yang melakukan kontra politik terhadap kebijakan Pemerintah utamanya berkaitan dengan Pilkada Kab. Sampang;
- b. Dampak dari pergantian Pj. Kades di Kab. Sampang dan Kebijakan Pj. Kades yang baru akan menimbulkan reaksi penolakan dari pok masyarakat diantaranya aksi terkait dinamika pelaksanaan Pilkada serentak Kab Sampang;
- c. Konflik antara kelompok Front Persaudaraan Islam (FPI) dengan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah (PWILS) terkait persoalan

14 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES SAMPANG  
NOMOR : KEP /64/X/ 2025  
TANGGAL : 29 OKTOBER 2025

persoalan nasab telah berlangsung selama beberapa tahun. Perseteruan ini memuncak pada Juli 2025 di Pemalang, Jawa Tengah, ketika terjadi bentrokan fisik di sela-sela acara pengajian akbar yang dihadiri oleh petinggi FPI, Rizieq Shihab. Kab. Sampang merupakan salah satu basis pengikut HRS yang cukup Fanatik. Eksistensi Pok FPI Kab. Sampang yang masih exist, dengan melakukan upaya – upaya pengawasan pada kegiatan masyarakat dan intervensi yang dapat menimbulkan potensi konflik/perpecahan;

- d. Pola elit Politik dalam menjalin kerjasama/koalisi antar parpol di lembaga legislatif (DPRD Kab. Sampang) akan membawa perubahan/warna tersendiri terhadap perkembangan situasi politik di Kab. Sampang dalam menyikapi setiap kebijakan yang ditempuh oleh Bupati Sampang;
- e. Potensi pelaksanaan Pilkadaes serentak Tahun 2026/2027 akan diikuti seluruh Desa di wilayah Kab. Sampang sebanyak 180 Desa sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Sampang nomor: 188.45/272/KEP/434.013/2021, tanggal 30 Juni 2021 dan dimungkinkan pelaksanaan akan berlangsung Tahun 2026/2027;
- f. Proses rekrutmen penyelenggara/panitia Pilkadaes dan pengawasan berpotensi terjadinya unsur KKN, proses tersebut cenderung bernilai berat sebelah terhadap salah satu pendukung Calkades terlebih ketidak netralan oknum pejabat dan Pemerintah Daerah;
- g. Permasalahan CSR yang terjadi ditengah masyarakat terdampak eksplorasi dan eksploitasi pengeboran Migas yakni Petronas Carigali di wilayah perairan Kec. Ketapang, PT. HCML Cnooc pty Ltd. di perairan Pulau Mandangin dan PT. Medco di wilayah perairan Kec. Camplong Kab. Sampang. Pemanfaatan sumber kekayaan alam yang ada di wilayah Kab. Sampang belum dapat dinikmati / menambah nilai pendapatan asli daerah Kab. Sampang karena banyaknya pihak/oknum yang terlibat didalamnya hanya untuk meraup keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu;
- h. Pelaksanaan Program Pembangunan dengan menggunakan APBD Kab. Sampang maupun Program pemerintah pusat berpotensi terjadinya penyalahgunaan/penyelewengan oleh oknum birokrasi maupun pejabat lainnya;
- i. Aksi kriminalitas yang bersifat konvensional maupun modern akan diprediksikan meningkat seiring kemajuan teknologi dan alat komunikasi dengan menggunakan modus baru salah satunya melalui pemanfaatan media sosial dalam kejahatan online (Kasus Tipu Gelap);
- j. Adanya jaringan teroris yang beraktifitas di wilayah Kab. Sampang dan tidak terpantau oleh masyarakat dan petugas;

k. Pelestarian

- k. Pelestarian budaya masyarakat Madura khususnya Kab. Sampang dengan menyelenggarakan kegiatan yang mengikutsertakan peran masyarakat Misalnya : kerapan sapi, pameran batik madura dan pentas kesenian, hiburan tradisional dll;
- l. Keamanan di Kab. Sampang dipengaruhi dengan terjadinya beberapa gangguan Kamtibmas yang terjadi baik secara konvensional maupun transnasional.



## 1) Aspek Ideologi

- a) Munculnya upaya menghidupkan kembali ideologi Komunis di Indonesia ataupun ideologi lain diluar Pancasila, namun untuk saat ini wilayah Kab. Sampang belum ditemukan adanya isu-isu komunisme tersebut;
- b) Eksistensi Kelompok Garis Keras berbasis agama tertentu yang dilakukan secara terbuka menolak ideologi Pancasila dan menuntut berlakunya syariat Islam disinyalir masih disuarakan oleh kelompok eks FPI dan eks HTI yang menghendaki pedoman hidup bangsa Indonesia harus berpegang pada prinsip – prinsip kebenaran agamanya, namun gerakannya lebih soft, rapi diibaratkan menggunakan gerakan bawah tanah;
- c) Konflik antara kelompok Front Persaudaraan Islam (FPI) dengan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah (PWILS) terkait persoalan nasab telah berlangsung selama beberapa tahun. Perseteruan ini memuncak pada Juli 2025 di Pemalang, Jawa Tengah, ketika terjadi bentrokan fisik di sela-sela acara pengajian akbar yang dihadiri oleh petinggi FPI, Rizieq Shihab.

## 2) Aspek Politik

a) Pasca.....

16 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES SAMPANG  
NOMOR : KEP /64/X/ 2025  
TANGGAL : 29 OKTOBER 2025

- a) Pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sampang terpilih an. H. SLAMET JUNAIDI dan KH. AHMAD MAHFUD AQ dengan periode masa jabatan 2025 – 2030, berpengaruh terhadap kebijakan kepemimpinan pejabat yang baru terjadi adanya rotasi dan pergantian Pj. Kepala Desa dalam menentukan program pembangunan di Kabupaten Sampang;
- b) Dampak dari pergantian Pj. Kades di Kab. Sampang menimbulkan reaksi penolakan dari pok masyarakat diantaranya aksi terkait dinamika pelaksanaan Pilkades serentak Kab Sampang :
- 1) Tanggal 9 April 2025 aksi unras oleh Aliansi Banyuates Tangguh (ALIBATA) sasaran aksi kantor kecamatan Banyuates korlap an. Hanafi dkk;
  - 2) Tanggal 16 April 2025 aksi unras oleh Forum Aliansi Sampang Bersatu (FASB) sasaran aksi Kantor DPRD dan Pemkab Sampang korlap an Abd Hamid dan Marzali alias Lihon;
  - 3) Tanggal 7 Mei 2025 aksi unras oleh Forum Aliansi Sampang Bersatu (FASB) sasaran aksi Kantor Pemprov Jatim korlap an Abd Hamid dan Marzali alias Lihon;
  - 4) Tanggal 15 Mei 2025 aksi unras oleh Aliansi Masyarakat Jrengik Menggugat (AMJM) sasaran aksi Kantor Kecamatan Jrengik korlap an Fathurrosi dkk;
  - 5) Pada tanggal 24 April 2025 di kantor DPRD Kab Sampang telah dilaksanakan giat audiensi oleh Aluansi Pemuda Mahasiswa Sampang (APMS) terkait alasan dan dasar hukum penundaan Pilkades serentak Kab Sampang, koordinator an. Mahrus dkk;
  - 6) Pada tanggal 5 Mei 2025 di Niki Kopi jl. Wijaya Kusuma Kab Sampang telah dilaksanakan giat diskusi publik dengan tema "mengurai benang kusut pelaksanaan Pilkades di Kab Sampang" penyelenggara LBH PC PMII Kab Sampang;
  - 7) Pada tanggal 9 Mei 2025 di kantor kecamatan Banyuates telah dilaksanakan giat audiensi oleh Aliansi Pemuda Tolang (APT) terkait PJ Kades baru koordinator an Ya'sun Zain;
  - 8) Pada tanggal 19 Mei 2025 dikantor DPMD Kab Sampang telah dilaksanakan giat audiensi oleh DPC PROJO Kab Sampang terkait operator Desa di 11 Desa di wilayah kecamatan Banyuates coordinator an. Varis Reza Malik;
  - 9) Tanggal 04 Juli 2025 dikantor DPRD Kab Sampang telah dilaksanakan audiensi oleh forum aktivis Madura (FAM) terkait pelayanan, mutasi dan pergantian perangkat Desa yang terjadi di wilayah Kec Kedungdung (Desa palenggian, Komis dan Pajeruan) koordinator an. Syamsul Arifin dan Jeppar;
  - 10) Tanggal 24 September 2025 dikantor DPRD Kab Sampang telah dilaksanakan audiensi lanjutan oleh forum aktivis Madura (FAM) terkait pelayanan, mutasi / pergantian perangkat Desa dan balai

Desa.....

- Desa yang terjadi di wilayah Kec Kedungdung (Desa palenggian, Komis dan Pajuruan) koordinator an. Syamsul Arifin dan Jeppar;
- 11) Tanggal 25 September 2025 di kantor DPRD Kab Sampang telah dilaksanakan audiensi oleh barisan pemuda peduli desa (BPPD) Kec Banyuates terkait pemberhentian perangkat Desa tanpa alasan yang jelas oleh PJ Kades, pergantian terjadi di 12 Desa se Kecamatan Banyuates.
- c) Berdasarkan Perbup Sampang Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Bahwa Pelaksanaan Pilkades serentak Kab Sampang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Sampang dan Bupati Sampang telah menetapkan Surat Keputusan Nomor: 188.45/272/KEP/434.013/2021, tanggal 30 Juni 2021 tentang pelaksanaan Pilkades serentak Kab. Sampang tahun 2025 dengan konsekuensi dari SK Bupati Sampang tersebut yaitu Jabatan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2021 dan 2025 akan dijabat oleh PJ. Kades, namun sepanjang tahun 2025 belum dilaksanakan Pilkades Kab. Sampang secara serentak. Dengan diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, SK bupati tersebut otomatis gugur karena tidak sesuai dengan perubahan UU Desa yang baru;
- d) Kebijakan Pj. Kades yang baru diantaranya merotasi dan memberhentikan perangkat desa serta memindahkan Kantor Balai Desa memicu aksi / protes masyarakat karena dinilai syarat dengan kepentingan politik Desa;
- e) Apabila wilayah Kab. Sampang pelaksanaan Pilkades serentak dilaksanakan Tahun 2025/2026, maka hanya akan diikuti oleh 142 Desa dari 180 Desa di Kab. Sampang. Namun apabila Pilkades serentak dilaksanakan dalam sehari sebanyak 180 Desa dimungkinkan akan dilaksanakan Tahun 2027 (Jabatan 38 Kades definitif berakhir pada awal Tahun 2028).

### 3) Aspek Ekonomi

- a) Kegiatan eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Wilayah Kab. Sampang oleh PT. Medco, PT. HCML dan PT. Petronas di semenanjung Pantai wilayah selatan dan utara Kota Sampang memungkinkan masih akan terus berlangsung pada Tahun 2026;
- b) Munculnya Potensi kerawanan terkait Pemerintah untuk merelokasi Pasar Srimangunan ke Pasar Margalela masih

Menjadi.....

menjadi trending permasalahan seputar penempatan pedagang ke tempat yang baru;

- c) Program MBG adalah Makan Bergizi Gratis, sebuah program prioritas nasional yang bertujuan untuk mengatasi malnutrisi, meningkatkan sumber daya manusia, dan mendorong ekonomi kerakyatan melalui pemberian makanan bergizi gratis di jenjang pendidikan PAUD hingga SMA/ sederajat, ibu hamil & menyusui serta Lansia. Diresmikan pada 6 Januari 2025 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program ini tidak hanya fokus pada gizi anak tetapi juga memberdayakan UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan menstabilkan harga pangan, dengan target menjangkau jutaan anak dan ibu, serta melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk operasionalnya. Program tersebut berpotensi terhadap Situasi Kamtibmas dilihat dari fakta yang terjadi Tahun 2025 keracunan massal, permasalahan pembagian tugas sebaran MBG dan permasalahan lainnya;
- d) Program Program Bansos untuk Rakyat mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah, Program Jaminan Kesehatan (PBI-JK), Program Keluarga Harapan (PKH), & Bansos Rastra / Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Perluasan program bantuan social merupakan komitmen pemerintah Pusat yang di laksanakan Jawa Timur untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Fungsi ini juga sejalan dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif;
- e) Indonesia bercita-cita menjadi negara dengan pendapatan per kapita yang setara dengan negara maju, sehingga dapat keluar dari Middle Income Trap (MIT). Oleh karena itu, Indonesia perlu mengubah pendekatan dalam membangun masa depan, dari reformatif menjadi transformatif, melalui 3 area perubahan, yakni transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola, tentunya ini merupakan aplikasi di Daerah-daerah khususnya wilayah Sampang dalam mewujudkan Cita-cita bangsa menuju Indonesia emas;
- f) Kenaikan harga BBM dan keterlambatan pasokan BBM yang timbul secara tentative atas kebijakan Pemerintah Pusat berpeluang menimbulkan potensi kerawanan Kamtibmas;
- g) Pengendalian Pemerintah terhadap stabilitas harga sembilan bahan pokok yang menjadi kebutuhan penting masyarakat dinilai lemah berpotensi kerawanan Kamtibmas tinggi karena berkaitan dengan kebutuhan perut;

h) Kebutuhan.....

- h) Kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani dalam proses pendistribusiannya tidak efektif dan efisien mengalami keterlambatan serta terjadinya ketidakcocokan pupuk subsidi Pemerintah dengan kebutuhan petani Sampang sehingga berpotensi rawan dugaan penyelewengan dalam pengelolaannya;
- i) Permasalahan CSR yang terjadi ditengah masyarakat terdampak eksplorasi dan eksploitasi pengeboran Migas yakni Petronas Carigali di wilayah perairan Kec. Ketapang, PT. HCML Cnooc pty Ltd. di perairan Pulau Mandangin dan PT. Medco di wilayah perairan Kec. Camplong Kab. Sampang.

#### **4) Aspek Sosial Budaya**

- a) Pelestarian budaya masyarakat Madura khususnya Kab. Sampang dengan menyelenggarakan kegiatan yang mengikutsertakan peran masyarakat Misalnya : kerapan sapi, pameran batik madura dan pentas kesenian, hiburan tradisional dll;
- b) Dalam bidang pendidikan Formal baik ditingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan menengah, sekolah lanjutan tingkat atas dan perguruan tinggi dari tahun ketahun mengalami peningkatan jumlah pelulusan yang tidak disertai dengan fasilitas dan kondisi Sekolah yang kurang memadai dalam hal ini perawatan gedung/Sekolah;
- c) Pendidikan secara nasional merupakan masalah yang sangat menonjol serta berdampak pada situasi Kamtibmas diantaranya :
  1. Ujian Nasional (Unas) tingkat SMU / SMK sederajat, tingkat SMP sederajat, tingkat Sekolah Dasar mengalami kendala akibat teknis/jaringan.
  2. Proses seleksi Penerimaan mahasiswa, murid baru tingkat SMU, SMP dan SD yang dilakukan tidak transparan dan adanya indikasi KKN agar dapat masuk ke sekolah favorit yang diinginkan dengan mengenyampingkan program yang sudah ditetapkan Pemerintah.
  3. Adanya indikasi penyalahgunaan dana BOS/dana bantuan lainnya oleh oknum Kepala Sekolah maupun oknum Dinas Pendidikan untuk kepentingan pribadi.

4. Kesalahan.....

4. Kesalahan dalam penerbitan buku Sekolah tidak sesuai dengan program Pendidikan nasional yang ditetapkan
- d) Mayoritas penduduk Kab. Sampang menganut ajaran Islam yang cukup fanatik sehingga memilih lingkungan pendidikan di Pondok pesantren yang sudah dilengkapi sarana pendidikan setara umum SD/MI/SMP/MTs dari pada pendidikan formal yang disediakan oleh Pemerintah;
  - e) Moratorium proses seleksi / rekrutmen Calon pegawai Negeri sipil tingkat Pusat, Daerah (Provinsi/Kabupaten) untuk semua jurusan dirasa belum memenuhi kebutuhan pekerjaan dengan jumlah pelamar;
  - f) Kegiatan sosial Masyarakat Kab. Sampang yang dilakukan di beberapa acara peringatan hari besar Islam/nasional masih didominasi oleh nuansa budaya masyarakat Madura;
  - g) Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari sebagian besar masyarakat Kab. Sampang khususnya masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah (SD/SMP) memilih untuk bekerja diluar negeri dengan harapan bisa merubah taraf hidup lebih baik yang umumnya menjadi Negara sasaran yaitu Malaysia, Taiwan dan Arab Saudi serta wilayah regional Jakarta dan Kalimantan;
  - h) Adanya pendeportasian Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kab. Sampang yang di luar negeri (Malaysia dan arab saudi) karena tidak memiliki dokumen resmi maupun habis masa berlakunya serta usai menjalani tindak pidana di negara tersebut;
  - i) Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor memasuki musim hujan di Kab. Sampang yang di akibatkan hujan kiriman dari wilayah utara yang merupakan daerah perbukitan menuju Kota Sampang yang merupakan daerah lembah;
  - j) Dualisme kepengurusan perguruan silat Setia Hati Terate (PSHT) antara Parluh 16 (Pusat Jakarta) dan Parluh 17 (Pusat Madiun) yang mana saat ini kepengurusan resmi sesuai dengan SK Kemenkumham dimenangkan oleh PSHT Parluh 16 (Pusat Jakarta), namun yang terdaftar di IPSI Kab. Sampang yakni PSHT Parluh 17 (Pusat Madiun);
  - k) Perselisihan antara Front Persaudaraan Islam (FPI) dan Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabillillah (PWI-LS), yang terjadi pada 23 Juli 2025 di Pemalang, Jawa Tengah.

Bentroka

Bentrokan ini dipicu oleh penolakan PWILS terhadap acara ceramah Habib Rizieq Shihab yang akan dihadiri oleh FPI. Permasalahan yang memicu konflik berakar pada perdebatan masalah nasab (keturunan). Untuk wilayah Sampang sampai saat ini belum terbentuk kepengurusan Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI-LS) sedangkan FPI Sampang dipimpin oleh Habib Abdurrahman Al-Khereed (Ketua DPW FPI Sampang);

- l) Unjuk rasa skala nasional dipicu oleh perbedaan pandangan teori politis yang terjadi di Tahun 2025 berpotensi terjadi kembali pada Tahun 2026, hal tersebut didasari oleh beberapa factor diantaranya:
  - a. Keterbukaan informasi publik;
  - b. Meningkatnya kecanggihan teknologi dalam transmitter informasi;
  - c. SDM;
  - d. Kekuasaan;
  - e. Ekonomi lemah/tidak stabil.
- m) Aksi unjuk rasa dari beberapa element masyarakat diantaranya Buruh, mahasiswa, massa parpol yang menentang kebijakan pemerintah dibidang hukum, Politik, ekonomi, sosial, hukum dan HAM;
- n) Budaya yang sering dilakukan pada Kabupaten Sampang yaitu Shalawat bersama (Haul), Acara petik laut, kerapan sapi, daul combo, pameran pembangunan, hiburan rakyat serta perayaan hari jadi Kabupaten Sampang.

## 5) Aspek Keamanan

- a) Terjadinya beberapa gangguan Kamtibmas yang terjadi baik secara konvensional maupun transnasional;
- b) Pembentukan Jaringan Terorisme baru dengan merekrut warga Sampang yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang dangkal atau setengahsetengah, broken home dsb berpeluang tinggi dijadikan jaringan baru;
- c) Munculnya paham-paham baru / madzab yang tidak jelas berkedok agama dan mempengaruhi masyarakat yang notabene kurang paham terhadap agama yang dianut sehingga mudah terpengaruh adanya ajaran/aliran baru yang semakin menyesatkan terlebih melanggar hukum;
- d) Meningkatnya.....

22 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES SAMPANG  
NOMOR : KEP /64/X/ 2025  
TANGGAL : 29 OKTOBER 2025

- d) Meningkatnya angka kemiskinan dan jumlah pengangguran yang dihadapkan pada situasi serta terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia merupakan factor yang dapat mendorong seseorang untuk berspekulasi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya/keluarganya dengan cara instant melakukan perbuatan criminal/ melanggar hukum;
- e) Faktor lain yang mendorong terjadinya tindak pidana adalah rendahnya tuntutan Jaksa/ringannya vonis hakim yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan yang tidak menimbulkan efek jera sehingga setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) ada kecenderungan untuk mengulangi perbuatan yang sama dikarenakan pula lemahnya pengawasan dan pembinaan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan;
- f) Kriminalitas di Kab. Sampang secara keseluruhan menunjukkan bahwa ancaman faktual dalam bentuk kriminalitas menunjukkan peningkatan/kenaikan dari tahun ketahun terutama segi kuantitasnya, kejadian kriminalitas pada tahun 2024 menurut jenis kejahatan bulan Januari s/d Desember di Polres Sampang sebagai berikut:

NO	JENIS KASUS	CRIME TOTAL							
		TH. 2023			TH. 2024			TREND %	
		L	S	%	L	S	%	L	S
1	CURAT	27	29	107,40	32	21	65,6	18,51	27,58
2	CURANMOR	45	34	75,55	38	35	92,1	15,55	-29
3	PERJUDIAN	4	10	250	13	9	69,2	-20	10
4	NARKOBA	154	156	100	124	124	100	-20,5	-20,5
5	CURAS	4	5	120	3	4	133	25	20
6	PEMBUNUHAN	4	3	75	7	8	114	-75	-166
7	PENIPUAN	30	15	50	42	24	57,1	-40	-60
8	KDRT	1	1	100	7	6	85,7	-600	-500
9	PENGHINAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

10 ANIAYA.....

23 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES SAMPANG  
NOMOR : KEP /64/X/ 2025  
TANGGAL : 29 OKTOBER 2025

NO	JENIS KASUS	CRIME TOTAL							
		TH. 2023			TH. 2024			TREND %	
		L	S	%	L	S	%	L	S
10	ANIAYA	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PERB TDK SENANG	2	1	50	4	5	125	-50	-400
12	PENGGELAPAN	7	1	14,28	11	8	72,7	-57,4	-700
13	ANIRING/ ANIAYA	21	26	123,80	35	29	82,8	-34,61	-38,09
14	PERKOSAAN	1	2	200	0	0	0	0	0
15	PENGEROYOKAN / 170	17	13	76,47	15	10	66,7	11,75	23,07
16	SENPI ILLEGAL	1	0	0	0	0	0	-	-
17	CEMAR NAMA BAIK	1	1	100	2	1	50	-100	-
18	PEMBAKARAN	4	1	25	1	1	100	75	-
19	PERAMPASAN / PEMERASAN	1	1	100	0	0	0	-	-
20	SAJAM	14	11	78,57	17	18	105,8	-21,42	-63,63
21	CURWATPHON	0	0	0	0	0	0	0	0
22	PENCABULAN	4	6	150	4	2	50	-	66,66
23	TADAH	0	0	0	1	1	100	-	-
24	PERADILAN ANAK	0	0	0	0	0	0	0	0
25	SEROBOT TANAH	2	1	50	0	0	0	-	-
26	PEMALSUAN	1	1	100	0	0	0	-	-
27	KET PALSU	2	0	0	2	0	0	-	-
28	PERCOBAAN CURAT/167	0	0	0	0	0	0	-	-

29 PERLINDUNGAN

24 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES SAMPANG  
NOMOR : KEP /64/X/ 2025  
TANGGAL : 29 OKTOBER 2025

NO	JENIS KASUS	CRIME TOTAL							
		TH. 2023			TH. 2024			TREND %	
		L	S	%	L	S	%	L	S
29	PERLINDUNGAN ANAK	1	0	0	1	3	300	-	-
30	PERZINAHAN	16	20	125	27	26	96,3	-68,75	-30
31	ANIRAT	1	0	0	1	1	100	-	-
32	KEBAKARAN	2	2	100	1	2	200	50	-
33	UANG/STNK PALSU	1	1	100	0	0	0	-	-
34	PENCULIKAN	0	0	0	1	1	100	-	-
35	PENGERUSAKAN/406	0	0	0	0	0	0	-	-
36	CUR HEWAN	3	2	66,66	2	1	50	33,33	50
37	RAMPAS MERDEKA ORG	1	0	0	1	0	0	-	-
38	PENCURIAN BIASA/KLRG	0	0	0	0	0	0	-	-
39	PERSETUBAHAN	7	10	142,85	19	14	73,4	-171,4	-40
40	PERCOBAAN CURAT/167	0	0	0	0	0	0	-	-
41	MIRAS/PSK	1	0	0	1	3	300	-	-
42	PERCOBAAN BUNUH	0	0	0	0	0	0	-	-
43	LAWAN PETUGAS	0	0	0	2	2	100	-	-
44	LAWAN PETUGAS	0	0	0	0	0	0	-	-
45	PENGANCAMAN	0	0	0	2	2	100	-	-
46	SEMBUNYI KAWIN	0	0	0	0	0	0	-	-

47 COBA.....

NO	JENIS KASUS	CRIME TOTAL							
		TH. 2023			TH. 2024			TREND %	
		L	S	%	L	S	%	L	S
47	COBA KOSA	0	0	0	1	1	100	-	-
48	AKIBAT KELALAIAN	0	0	0	2	1	50	-	-
	<b>JUMLAH</b>	385	347	83,4	419	362	80,7	-28,82	-24,60

**1. Data Laka Lintas dan Pelanggaran Lintas.**

Data kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Sampang pada tahun 2023 – 2024 sebagai berikut :

**a) Data Laka Lintas dan Korban :**

NO	URAIAN	JUMLAH		TREND	
		TAHUN 2023	TAHUN 2024	ANGKA	%
1	Laka Lintas	415	260	-155	-37.35
2.	Meninggal Dunia	74	76	2	2.7
3.	Luka Berat	3	7	4	133.33
4.	Luka Ringan	490	297	-93	-39.39
5.	Kerugian Materiil	5.677.350.000	445.400.000	-121.950.000	21.49

**b) Data Langgar Lintas :**

NO	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH		KET
		TAHUN 2023	TAHUN 2024	
	<b>JUMLAH PELANGGARAN</b>	<b>3.407</b>	<b>1.799</b>	
1	Muatan	98	127	
2	Surat-Surat (TNKB,STNK,SIM)	435	1052	
3	Perlengkapan	321	763	
4	Marka / Rambu-Rambu	257	632	
5	Lain-Lain / Helm	688	2430	
6	Denda Tilang	53.438.000	197.513.000	

1 CRIME.....

26 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES SAMPANG  
NOMOR : KEP /64/X/ 2025  
TANGGAL : 29 OKTOBER 2025

(2) Trend Kejadian Kriminalitas yang menonjol yang terjadi setiap bulan pada tahun 2023 dari bulan Januari s/d Desember sebagai berikut :

a) Data Crime Total tahun 2023 – 2024 sebagai berikut :

NO	URAIAN	TAHUN		TREND		KET
		2023	2024	ANGKA	%	
1	CRIME TOTAL	229	295	-66	-28,82	
2	CRIME CLEARANCE	191	238	-47	-24,60	
3	CLEARANCE RATE	83,40	80,67	2,73	3,27	
4	CRIME CLOCK	5 Hari 175 Menit	4 Hari 10 Jam	1 Hari 7 Jam	-0,28	
5	CRIME RATE	22,24	57	-6,23	-50	
6	TUNGGAKAN PERKARA	38		-19		
JUMLAH PENDUDUK		1.033.926 Jiwa				

b) Data Crime Index perkasus tahun 2023 – 2024 sebagai berikut :

NO	JENIS KEJAHATAN	CRIME TOTAL							
		TAHUN 2023			TAHUN 2024			TREND %	
		L	S	%	L	S	%	L	S
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	CURAS	4	5	125	3	4	133	-25,00	-20,00
2	CURAT	27	29	107,4	32	21	65,6	18,52	-27,59
3	CURANMOR	45	34	75,6	38	35	92,1	-15,56	2,94
4	CURWAN	1	0	0	1	0	0	0	0
5	CURBIASA	7	10	142,8	19	14	73,4	171,43	40,00
JUMLAH		84	78	92,8	93	74	79,5	10,71	-5,13

## 7) Situasi Perbatasan Kab. Sampang.

Perkembangan lingkungan strategis Kab. Sampang yang terbentuk akibat inter aksi wilayah Perbatasan dapat digambarkan sebagai berikut :

### I). Dengan Wilayah Kab. Bangkalan.

(a) Sisi sebelah utara Karakteristik masyarakat Kab. Sampang yang berbatasan dengan Kab. Bangkalan memiliki karakteristik yang hampir sama hanya sedikit perbedaan pada pola kehidupan yang lebih modern karena wilayah Kab. Bangkalan dekat dengan Kota Surabaya yang banyak diwarnai keberadaan masyarakat urban baik dari Indonesia timur maupun Indonesia barat;

(b) Sisi.....

- (b). Sisi sebelah selatan sebagai jalur alternatif menghubungkan kabupaten di sebelah timur Kab. Sampang serta sebagai jalur utama menuju ke pintu penyeberangan jembatan Suramadu sisi Madura;
- (c). Kab. Bangkalan sebagai akses jalan Suramadu memberikan ruang masuknya arus lintas ekonomi sekaligus kejahatan melalui jembatan tersebut sehingga memberikan imbas meningkatkan perekonomian maupun potensi kerawanan Kamtibmas di wilayah Kab. Sampang;
- (d). Sebagai daerah operasi pelaku tindak kejahatan dari wilayah Timur Kab. Sampang maupun Kota lain yang berpotensi juga terjadi di wilayah Kab. Sampang;
- (e). Kondisi jalan/sarana penghubung kedua wilayah memiliki potensi kerawanan yang hampir sama besarnya terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas maupun aksi kriminal lainnya;
- (f). Lokasi konflik/perebutan wilayah tangkapan antara nelayan terkait alat tangkap yang digunakan saat mencari ikan. Konflik antara nelayan Kec. Sreseh dengan nelayan Ds. Kwanyar Kec. Bangkalan sudah sejak lama terjadi namun dapat dikendalikan dan selalu berakhir damai.

## **II). Dengan Laut Jawa.**

- (a). Berpotensi sebagai area mata pencaharian masyarakat Kab. Sampang sebagai nelayan atau kegiatan lain yang mungkin dikembangkan Misal: bertani rumput laut atau ternak ikan air laut;
- (b). Merupakan jalur transportasi masyarakat Kab. Sampang menuju ke wilayah lain dengan menggunakan perahu/Kapal sebagai alat transportasinya;
- (c). Lokasi sumber daya alam yang mulai di eksplorasi oleh pihak swasta mengetahui Pemerintah daerah;
- (d). Sebagai lalu lintas transportasi laut bagi masyarakat pesisir baik di Kab. Sampang dan Kab. Lainnya di Madura serta lalu lintas perdagangan antar pulau;
- (e). Medan operasi pelaku kejahatan dalam bentuk illegal fishing, jual beli BBM maupun barang hasil kejahatan lainnya.

III) Dengan.....

**III). Dengan Selat Madura / Sebelah selatan.**

- (a). Wilayah Selatan Kab. Sampang merupakan perairan yang memiliki potensi sumber kekayaan alam yang saat ini sudah dilakukan eksplorasi oleh Pty. Husky Ltd dan PT. Medco Ltd. sehingga mendorong sumber pendapatan Pemerintah daerah maupun pusat;
- (b). Sebagai wilayah mengais rejeki bagi masyarakat pesisir sebelah selatan yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan sarana perdagangan antar pulau/kabupaten lainnya;
- (c). Medan operasi pelaku kejahatan dalam bentuk eksplorasi kekayaan alam secara besar-besaran tanpa memperhatikan dampak lingkungan;
- (d). Lokasi konflik/perebutan wilayah tangkapan antara nelayan terkait alat tangkap yang digunakan saat mencari ikan.

**IV). Dengan Kab. Pamekasan.**

- (a). Sisi sebelah utara Masyarakat kab. Sampang dan Kab. Pamekasan memiliki karakteristik yang hampir sama bahkan di wilayah utara lebih dominan mengadopsi di Kab. Pamekasan karena jarak tempuh ke Kota sampang  $\pm$  35 Km dengan Kota Pamekasan;
- (b). Sisi sebelah selatan juga memiliki kebiasaan yang sama mayoritas masyarakat Kab. Sampang yang berbatasan langsung dengan Kab. Pamekasan memiliki mata pencaharian sebagai nelayan;
- (c). Dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Kab. Sampang lebih banyak memilih belanja di Kab. Pamekasan, ini disebabkan harga barang lebih murah dan lengkap dibanding Kab. Sampang;
- (d). Sebagai jalur alternatif penghubung dengan wilayah Kabupaten paling timur wilayah Madura (Kab. Sumenep) yang berpotensi sebagai jalur potensi Kamtibmas.

**b. Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities dan Threats)**

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Polres Sampang dalam rangka melaksanakan fungsi keamanan tersebut dapat

dianalisa.....

dianalisa dari faktor-faktor lingkungan intern maupun ekstern melalui analisa SWOT, yaitu :

- 1) Kekuatan (Strength) :
  - a. Meningkatnya anggaran dari tahun ke tahun dan telah dapat memenuhi kebutuhan operasional Polres Sampang terutama dalam kegiatan operasional dalam menunjang kegiatan/operasional Polres Sampang;
  - b. Alokasi anggaran yang tepat dalam pemenuhan teknologi Kepolisian dan sistem informasi dan memprioritaskan Polres-Polres lain yang belum memiliki peralatan tersebut disertai kemampuan mengelola kegiatan dan anggaran untuk program yang telah diprioritaskan dan pencapaian kinerja yang berkualitas;
  - c. Meningkatnya kemampuan fungsi operasional dan mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, khususnya penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara (korupsi, illegal logging, illegal mining), kejahatan yang berimplikasi kontinjensi (kerusuhan massa), kejahatan *transnational crime* (terorisme narkoba) dan kejahatan konvensional (jiwa, harta benda, dan kehormatan) sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap Polres Sampang;
  - d. Terpenuhinya jabatan dan unit-unit baru berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor akan semakin meningkatkan pelayanan Polres Sampang kepada masyarakat;
  - e. Dukungan sarana dan prasarana yang terpenuhi tentang kebutuhan penambahan fasilitas Polsek serta terdukungnya pembangunan fasilitas guna kelancaran pelayanan Polres Sampang ke masyarakat;
  - f. Tunjangan kinerja/remunerasi kepada personel Polri Polres Sampang sebagai dorongan, semangat untuk terus melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kinerja;
  - g) Jumlah penduduk Kab. Sampang sebanyak 1.033.926 orang sedangkan personel Polri Polres Sampang beserta jajarannya 585 orang dengan rasio 1 : 1.767 yang tergelar di Mapolres, 14 Polsek yang terdiri dari :
    - Pamen sebanyak 6 orang.
    - Pama sebanyak 47 orang.
    - Bintara sebanyak 519 orang.
  - h) Jumlah.....

30 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES SAMPANG  
NOMOR : KEP /64/X/ 2025  
TANGGAL : 29 OKTOBER 2025

- h) Jumlah Personel PNS Polri Polres Sampang sebanyak 14 Orang terdiri dari :
- Golongan III sebanyak 2 orang.
  - Golongan II sebanyak 12 orang.
  - Golongan I sebanyak 0 orang.
- i) Perbandingan jumlah penduduk dengan Bhabinkamtibas per kecamatan

NO	KECAMATAN	PENDUDUK	BHABIN	PERBANDINGAN RASIO
1	Sreseh	37.666	3	1:12127
2	Torjun	43.644	4	1:10481
3	Pangarengan	27.818	6	1:4433
4	Sampang Kota	135.582	10	1:13086
5	Camplong	91.926	5	1:17712
6	Omben	91.198	8	1:10964
7	Kedungdung	97.926	5	1:18767
8	Jrengik	40.011	3	1:12798
9	Tambelangan	56.934	4	1:13512
10	Banyuates	87.674	5	1:16683
11	Robatal	59.769	4	1:14246
12	Karang Penang	80.607	5	1:15431
13	Ketapang	97.718	7	1:13187
14	Sokobanah	85.453	7	1:11451
	<b>TOTAL</b>	<b>1.033.926</b>	<b>150</b>	<b>1:13004</b>

- d) Performa instrumental berupa perubahan sistem kinerja berbasis anggaran, sehingga pelayanan Polisi pada masyarakat diharapkan semakin efektif.
- e) Komitmen meningkatkan kuantitas anggota Polri, pada rasio jumlah Polisi terhadap pertumbuhan penduduk, jumlah personil Polres Sampang beserta jajarannya 585 dengan rasio 1 : 1767.
- f) Jumlah peralatan materiil (R2/4/6/10) untuk melaksanakan tugas pokok telah dicukupi mulai sejak tingkat Polsek dan Polres secara berjenjang sampai dengan fungsi pembinaan maupun operasional ditingkat Mapolres Sampang, antara lain yaitu :
- a. Polres telah dilengkapi dengan mobil dinas jabatan dan Polsek telah dilengkapi rata-rata 7 unit R2 dan 2 unit

R4 Data.....

31 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES SAMPANG  
NOMOR : KEP /64/X/ 2025  
TANGGAL : 29 OKTOBER 2025

R4 Data Ranmor Dinas Sesuai Simak BMN Sebagai Berikut:

Data Ranmor Dinas sesuai Simak BMN					
No	Kesatuan	Jenis kendaraan			
		R2	R4	R6	KAPAL
1	KAPOLRES		1		
2	WAKA POLRES				
3	BAG OPS	1	1		
4	BAG SDM	6	1		
5	BAG REN	2	1		
6	BAG LOG	1	2	1	
7	RESKRIM	2	1		
8	NARKOBA				
9	SAMAPTA	23	6	4	
10	LANTAS	9	7	1	
11	BINMAS	4	1		
12	TAHTI		1		
13	SIWAS				
14	SPKT		1		
15	INTEL	1	3		
16	SITIK				
17	SIUM				
18	SI KEU	1			
19	PROPAM	2	1		
20	SAT POL AIR	1	1		4
21	HUMAS		1		
22	SI DOKES	1	1		
23	SI HUKUM				
24	POLSEK KOTA	7	2		
25	POLSEK TORJUN	7	2		
26	POLSEK PENGARENGAN	7	2		
27	POLSEK CAMPLONG	6	2		
28	POLSEK JRENGIK	7	2		
29	POLSEK SRESEH	6	1		
30	POLSEK OMBEN	8	2		
31	POLSEK KARANG PENANG	8	1		
32	POLSEK KEDUNDUNG	8	2		
33	POLSEK ROBATAL	7	2		
34	POLSEK TAMBELANGAN	8	2		
35	POLSEK KETAPANG	5	3		

36 POLSEK

32 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES SAMPANG  
NOMOR : KEP /64/X/ 2025  
TANGGAL : 29 OKTOBER 2025

36	POLSEK BANYUATES	6	2		
37	POLSEK SOKOBANA	5	2		
JUMLAH TOTAL		149	57	6	4

2) Kelemahan :

- a) Masih kurangnya personel di lapangan khususnya di Polsek-Polsek sehingga jika terjadi laka lantas di Polsek penangannya masih ditangani oleh Sat Lantas Polres dalam menghadapi kuantitas kecelakaan yang tinggi. Serta perlunya pelatihan Penanganan kasus Kecelakaan Lalu Lintas, olah TKP dan TP TKP Laka Lantas terhadap Anggota Unit Laka Sat Lantas;
- b) Masih terbatasnya kemampuan dan profesional para penyidik Laka Lantas, berdampak pada kecepatan penyelesaian perkara dan belum sepenuhnya memanfaatkan kerjasama dengan instansi terkait agar transparan, cepat dan tepat sesuai yang diharapkan;
- c) Kuantitas personel Polres Sampang belum memadai sehingga belum menghasilkan hasil didik yang sesuai dengan standar kompetensi dan *Mind Set and Culture* dihadapkan dengan situasi Kamtibmas yang semakin kompleks;
- d) Rasio perbandingan antara Polri dan penduduk (1:1767) belum ideal dapat dipenuhi. Jumlah penduduk Indonesia saat ini 273.523.615 jiwa atau 3,51% dari total populasi dunia, dimana jumlah penduduk Sampang sekitar 1.033.926 jiwa.

3) Peluang :

- a) Pengelolaan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan nasional antara lain kondisi geografis, demografis dan sumber daya alam menjadi peluang dalam menunjang kepentingan nasional;
- b) Iklim demokrasi dan reformasi memberi dampak kepada tumbuhnya ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi dan dinamis terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK) menyediakan peluang bagi Polres;
- c) Sampang.....

- c) Sampang untuk melanjutkan reformasi birokrasi baik dalam aspek struktural, instrumental, maupun kultural;
  - d) Teknologi nasional yang dapat mengawasi perairan Indonesia secara lebih efektif. Teknologi yang dimaksud antara lain dapat membuat *mapping* potensi kerawanan, kajian tentang luas wilayah terkait dengan berapa jumlah kapal atau personil yang harus dimiliki;
  - e) Reformasi kultural yang telah menunjukkan kemajuan di Polres Sampang dalam menghapus paradigma lama dalam melayani masyarakat. Sehingga, optimalisasi pelayanan masyarakat yang prima dapat terus dilakukan melalui penggelaran personel dan peralatan Polri berbasis teknologi;
  - f) Membenahi manajemen SDM guna peningkatan kapasitas dan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bidang kerja masing-masing;
  - g) Peran Bidang Humas dalam memberikan penerangan tentang agenda pembangunan kepada masyarakat melalui implementasi keterbukaan informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat;
  - h) Proses rekrutmen maupun pergeseran personel hasil Dikbang atau mutasi yang berkualitas sehingga tercipta postur Polri yang diharapkan guna memberikan sebaran pelayanan prima kepada masyarakat;
  - i) Pemanfaatan teknologi berbasis e-manajemen dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana. Sehingga data bisa dilaporkan secara terpadu dan pimpinan bisa mengetahui hambatan yang dihadapi oleh masing-masing penyidik;
  - j) Cakupan layanan pengukuran indeks kepuasan masyarakat yang berpeluang untuk ditingkatkan.
- 4) Ancaman :
- a) Pemilihan serentak Pilkades, memiliki tingkat kerawanan yang lebih tinggi dari Pilpres. Beberapa kemungkinan terjadinya disharmoni, politisasi SARA dan politik identitas. *Mapping* dan antisipasi koordinasi dilakukan untuk membangun silaturahmi walaupun dinamika-dinamika yang ada berjalan aman damai dan demokrasi dapat berjalan dengan baik;
  - b) Konflik yang dapat muncul selama masa darurat yang terjadi

karena wabah *Corona virus Disease* (Covid-19) antara lain upaya pemblokiran akses jalan sehingga menimbulkan kericuhan, seperti penjarahan, penodongan, pemalakan atau kriminalitas sejenisnya, yang berpotensi menghambat akses kendaraan logistik pangan dan medis;

- c) Adanya dimensi baru dalam penyebaran kejahatan-kejahatan akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membawa dampak negatif seperti kejahatan siber. Dalam era virtual saat ini baik kejahatan terhadap sistem informasi (*computer crime*) maupun kejahatan lama yang akan lebih mudah dilakukan dengan teknologi informasi (*computer related crime*). Hal tersebut dapat berkontribusi negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat, bahkan keamanan negara;
- d) Gangguan keamanan pada jalur aktivitas masyarakat di perairan. Potensi perairan Indonesia yang luas belum sepenuhnya dapat dijaga secara maksimal akibatnya membuka peluang terjadinya pelanggaran yang melibatkan masyarakat dalam negeri ataupun para pelaku luar negeri akan semakin besar;
- e) Keberagaman pelanggaran di perairan dimana tidak hanya pada persoalan *illegal fishing*, berkembang menjadi pelanggaran wilayah pemanfaatan alat tangkap, ketidaklengkapan dokumen perizinan penangkapan, tidak mengaktifkan kelengkapan alat komunikasi. Pelanggaran terus meluas ke human trafficking, pasokan dan peredaran Narkoba, pasokan dan distribusi senjata untuk kepentingan kejahatan.

## 2. Identifikasi masalah.

Pelaksanaan tugas Polres Sampang seiring dengan perkembangan lingkungan strategi global, regional dan nasional akan semakin berat tantangannya dan semakin kompleks. Serta tuntutan dan harapan masyarakat terhadap profesionalisme kinerja Polres Sampang dan pelayanan di bidang kepolisian oleh Polres Sampang yang semakin tinggi mengharuskan Polres Sampang menyusun berbagai upaya dan langkah-langkah aksi yang konkrit dan efektif dalam mewujudkan Kab. Sampang yang aman, tertib dan berkeadilan melalui Kepolisian yang berorientasi pada masyarakat. Secara umum permasalahan di bidang keamanan yang akan dihadapi oleh Polres Sampang pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Pasca Pilkada 2024 dan permasalahan pelaksanaan Pilkadaes serentak TH. 2026/2027 menimbulkan potensi kerawanan yang kompleks dimana masih terdapat beberapa masyarakat atau tokoh lawan politik yang melakukan kontra politik terhadap kebijakan Pemerintah utamanya berkaitan dengan Pilkadaes Kab. Sampang;

- b. Dampak dari pergantian Pj. Kades di Kab. Sampang dan Kebijakan Pj. Kades yang baru akan menimbulkan reaksi penolakan dari pok masyarakat diantaranya aksi terkait dinamika pelaksanaan Pilkades serentak Kab Sampang;
- c. Konflik antara kelompok Front Persaudaraan Islam (FPI) dengan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah (PWILS) terkait persoalan nasab telah berlangsung selama beberapa tahun. Perseteruan ini memuncak pada Juli 2025 di Pemalang, Jawa Tengah, ketika terjadi bentrokan fisik di sela-sela acara pengajian akbar yang dihadiri oleh petinggi FPI, Rizieq Shihab. Kab. Sampang merupakan salah satu basis pengikut HRS yang cukup Fanatik. Eksistensi Pok FPI Kab. Sampang yang masih exist, dengan melakukan upaya – upaya pengawasan pada kegiatan masyarakat dan intervensi yang dapat menimbulkan potensi konflik/perpecahan;
- d. Pola elit Politik dalam menjalin kerjasama/koalisi antar parpol di lembaga legislatif (DPRD Kab. Sampang) akan membawa perubahan/warna tersendiri terhadap perkembangan situasi politik di Kab. Sampang dalam menyikapi setiap kebijakan yang ditempuh oleh Bupati Sampang;
- e. Potensi pelaksanaan Pilkades serentak Tahun 2026/2027 akan diikuti seluruh Desa di wilayah Kab. Sampang sebanyak 180 Desa sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Sampang nomor: 188.45/272/KEP/434.013/2021, tanggal 30 Juni 2021 dan dimungkinkan pelaksanaan akan berlangsung Tahun 2026/2027;
- f. Proses rekrutmen penyelenggara/panitia Pilkades dan pengawasan berpotensi terjadinya unsur KKN, proses tersebut cenderung bernilai berat sebelah terhadap salah satu pendukung Calkades terlebih ketidak netralan oknum pejabat dan Pemerintah Daerah;
- g. Permasalahan CSR yang terjadi ditengah masyarakat terdampak eksplorasi dan eksploitasi pengeboran Migas yakni Petronas Carigali di wilayah perairan Kec. Ketapang, PT. HCML Cnooc pty Ltd. di perairan Pulau Mandangin dan PT. Medco di wilayah perairan Kec. Camplong Kab. Sampang. Pemanfaatan sumber kekayaan alam yang ada di wilayah Kab. Sampang belum dapat dinikmati / menambah nilai pendapatan asli daerah Kab. Sampang karena banyaknya pihak/oknum yang terlibat didalamnya hanya untuk meraup keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu;
- h. Pelaksanaan Program Pembangunan dengan menggunakan APBD Kab. Sampang maupun Program pemerintah pusat berpotensi terjadinya penyalahgunaan/ penyelewengan oleh oknum birokrasi maupun pejabat lainnya;
- i. Aksi kriminalitas yang bersifat konvensional maupun modern akan diprediksikan meningkat seiring kemajuan teknologi dan alat

komunikasi dengan menggunakan modus baru salah satunya melalui pemanfaatan media sosial dalam kejahatan online (Kasus Tipu Gelap);

- j. Adanya jaringan teroris yang beraktifitas di wilayah Kab. Sampang dan tidak terpantau oleh masyarakat dan petugas;
- k. Penegakan Hukum Tumpang Tindih Dan Polemik Kelembagaan Yang Terus Berkelanjutan Memecahkan Konsentrasi Penegakan Hukum Yang Diharapkan Masyarakat, Serta Masih Adanya Intervensi Politik Terkait Penyidikan, Penuntutan Dan Peradilan Sehingga Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Tersebut Rawan Penyebaran/Eksentensi Kegiatan Dari Kelompok Intoleran Membias. Maka Dengan Kondisi Tersebut Tindak Pidana Korupsi Tahun 2026 Diperkirakan Semakin Meningkat Dengan Modus Lama Ataupun Modus Baru;
- l. Satu Desa Satu Bhabinkamtibmas, Sebagai Basis Deteksi Dini Dan Problema Solving, Belum Mencapai Idial Masih Merangkap Tugas Di Beberapa Desa, Dan Terlibat Tugas Operasional.

## **BAB II** **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS**

### **1. Visi dan Misi Polda Jatim.**

#### **a) Visi Polda Jatim**

**“Terwujudnya Jawa Timur yang aman, Tertib dan berkeadilan melalui Kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat”.**

Makna Visi Polda Jatim :

Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah yang aman dan tertib atas peran dan fungsi Polda Jawa Timur.

#### **b) Misi Polda Jatim**

**“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat di Lingkungan Polda Jawa Timur.”**

Makna Misi Polda Jatim :

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

### **2. Visi dan Misi Polres Sampang.**

#### **a) Visi Polres Sampang**

**“Terwujudnya keamanan dan Ketertiban di Seluruh Daerah Hukum Polres Sampang.”**

Makna Visi Polres Sampang :

Kabupaten Sampang menjadi wilayah yang aman dan tertib atas peran dan fungsi Polres Sampang.

#### **a) Misi Polres Sampang**

**“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat di Lingkungan Polres Sampang.”**

Makna Misi Polres Sampang:

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

### 3. Tujuan.

#### a. Tujuan Polda Jatim

- 1) menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil dan tertib dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur secara Responsif dan Prediktif;
- 2) meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polda Jatim yang berintegritas, modern dan akuntabel dengan mengutamakan keadilan, transparansi dan perlindungan hak azasi manusia serta mampu menjalankan peran utamanya dalam menegakkan hukum, melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan negara dengan cara yang lebih professional, responsif dan adaptif;
- 3) meningkatkan kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polda Jatim agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dengan profesional, berintegritas dan adaptif melalui pengelolaan dan pengembangan SDM Polda Jatim yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan;
- 4) membangun dan mengembangkan infrastruktur strategis Kepolisian yang mendukung operasional kepolisian yang efisien dan terintegrasi, pemeliharaan Kamtibmas yang optimal pelayanan publik yang berkualitas, penegakkan hukum yang lebih professional sehingga dapat mendukung kinerja Polda Jatim dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal;
- 5) memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Polda Jatim.

#### b. Tujuan Polres Sampang.

- 1) Meningkatnya pelayanan penegakan hukum Polres Sampang yang mengutamakan kepastian, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, inklusivitas dan profesionalisme, dengan indikator tujuan :
  - a).situasi dan kondisi yang kondusif bebas dari gangguan kamtibmas sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari;
  - b).berkurangnya tindak pidana kriminalitas dan mencegah gangguan kamtibmas dengan mengedepankan upaya preemtif dan preventif.

- 2) Menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil, dan tertib, dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat Sampang secara proaktif dan antisipatif, dengan indikator tujuan :
  - a).tercapainya penyelesaian dan pengungkapan penanganan kasus tindak pidana (Kejahatan Konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan Transnasional).
  - b).peningkatan pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana yang transparan, akuntabel, objektif dan terpenuhinya hak tersangka dan korban dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
3. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polres Sampang agar dapat menjalankan tugas dan fungsi Kepolisian dengan profesional dan berintegritas melalui pengelolaan dan pengembangan SDM Polri yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan, dengan indikator tujuan :
  - a) Terlaksananya Sistem informasi penilaian kinerja (SIPK), Penilaian Rohani , Psikologi dan Jasmani serta terlaksananya siding kode etik bagi anggota yang melanggar sehingga tercipta budaya kerja yang melayani, terbuka dan akuntabel.
4. Tersedianya infrastruktur dan peralatan strategis di lingkungan Polres Sampang yang mendukung operasional kepolisian, pemeliharaan Kamtibmas, pelayanan publik serta penegakan hukum yang berkualitas, profesional, efektif, mudah diakses dan inklusif, dengan indikator tujuan :
  - i. terbentuknya Polisi yang melayani, melindungi dan mengayomi seiring dinamika masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan optimalisasi sarana prasarana guna memberikan pelayanan yang berkualitas.
5. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Polres Sampang dan jajarannya, dengan indikator tujuan :terbangunnya kepercayaan masyarakat atas pelayanan Polri, terlaksananya kinerja anggota secara akuntabel serta terselesaikannya pengaduan masyarakat dan permasalahan hukum yang melibatkan anggota.

#### 4. Sasaran Prioritas

##### a. Sasaran Prioritas Polda Jatim

Sebagaimana penjabaran sasaran prioritas Polri Tahun 2026 maka Adapun sasaran prioritas Polda Jatim Tahun 2026 ditetapkan sebagai berikut :

- 1) **pertama** “Menjaga dan Memelihara Kamtibmas di seluruh Wilayah Hukum Polda Jawa Timur secara Responsif dan Prediktif”;
- 2) **kedua** “Mewujudkan Pelayanan Publik Polda Jatim yang Berkualitas dan Terintegrasi”;
- 3) **ketiga** “Menegakkan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan di wilayah Hukum Polda Jawa Timur”;

- 4) **keempat** “Mewujudkan SDM Polda Jatim yang Profesional, Cerdas dan Berintegritas melalui Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan”;
- 5) **kelima** “Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Terintegrasi dalam Mendukung Operasional Kepolisian di wilayah Hukum Polda Jatim”;
- 6) **keenam** “Meningkatkan dan Mewujudkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian di wilayah hukum Polda Jatim Dalam Rangka Memperkuat Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Baik.

#### **b. Sasaran Prioritas Polres Sampang**

Sebagaimana penjabaran sasaran prioritas Polda Jatim Tahun 2026 maka Adapun sasaran prioritas Polres Sampang Tahun 2026 ditetapkan sebagai berikut :

- 1) **pertama** “Menjaga dan Memelihara Kamtibmas di seluruh Wilayah Hukum Polres Sampang secara Responsif dan Prediktif”;
- 2) **kedua** “Mewujudkan Pelayanan Publik Polres Sampang yang Berkualitas dan Terintegrasi”;
- 3) **ketiga** “Menegakkan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan di wilayah Hukum Polres Sampang”;
- 4) **keempat** “Mewujudkan SDM Polres Sampang yang Profesional, Cerdas dan Berintegritas melalui Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan”;
- 5) **kelima** “Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Terintegrasi dalam Mendukung Operasional Kepolisian di wilayah Hukum Polres Sampang”;
- 6) **keenam** “Meningkatkan dan Mewujudkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian di wilayah hukum Polres Sampang Dalam Rangka Memperkuat Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Baik.

### **BAB III**

#### **ARAH KEBIJAKAN**

#### **1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Jatim Tahun 2025**

a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Memelihara kamtibmas di wilayah Jatim secara proaktif guna menciptakan rasa aman masyarakat di wilayah Jatim”**, yaitu:

1) Meningkatkan penguatan peran Polda Jatim dalam menjaga Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) memetakan potensi gangguan, terorisme, aksi radikal, konflik sosial, dan situasi gangguan Kamtibmas lainnya; (giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog Harkamtibmas/SP1);

b) melakukan Lidikpangal dengan fokus pada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya; (giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog Harkamtibmas/SP 1);

2) Menurunkan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang produktif;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) meningkatkan pembinaan dan penyuluhan serta sambang dalam memberikan konsultan dalam pemecahan masalah yang terjadi ditengah masyarakat; (giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1);

b) Pemberdayaan potensi masyarakat sebagai antisipasi terhadap gangguan Kamtibmas lainnya (Narkoba, Terorisme, Kejahatan Konvensional lainnya, dll). (giat 5076/prog Harkamtibmas /SP 1);

c) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerjasama dengan instansi terkait serta pemanfaatan mantan teroris yang sudah Pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal dan deradikalisasi; (giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1);

d) patroli konten dan kontra narasi pada kanal-kanal media online dan media sosial yang sehat menjadi saluran penyebaran



- propaganda kekompok teroris;  
(giat 3143/prog Lidik sidik/SP 1);
- e) peningkatan jumlah konten edukasi pada media sosial;  
(giat 3143/prog Lidik sidik/SP 1);
- f) peningkatan jumlah kegiatan kampanye Siber MII kanal Siber TV; (giat 3143/prog Lidik sidik/SP 1);
- e) menetralsir dan menekan isu serta berita negatif yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas;  
(giat 3149/prog Dukma/SP 1);
- f) melaksanakan Patroli Perintis Presisi dan Patroli Kota Presisi sebagai eskalasi gangguan Kamtibmas yang terjadi berdasarkan perkiraan inteljen yang ada;  
(giat 3143/prog lidik sidik/SP 1);
- g) peningkatan kegiatan bintibmas masyarakat pesisir guna menekan gangguan terorisme dengan memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut;  
(giat 3155/prog Harkamtibmas/SP 1);
- h) meningkatkan patroli di wilayah masyarakat pesisir dan sepanjang garis pantai dalam rangka melaksanakan pengamanan pencegahan terorisme dan penegakkan hukum di wilayah perairan Jawa Timur;  
(giat 3155/prog Harkamtibmas/SP 1);
- i) meningkatkan pembinaan dan penyuluhan serta sambang kepada kelompok kontra radikal dan kepada masyarakat terkait pencegahan kejahatan;  
(giat 3149/prog Dukma/SP 1);
- j) melaksanakan Patroli secara berkala dan continue pada daerah rawan gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polda Jatim;  
(giat 3130/prog Harkamtibmas/SP 1);
- k) Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan risk assesmen pada obyek vital nasional dan obyek tertentu  
(giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1/);
- l) Memetakan potensi aksi terorisme dan kontra radikalisme melalui lidikpangal intel brimob serta konflik sosial dan gangguan keamanan lainnya dengan membuat zona back up wilayah sesuai dengan dislokasi Kompi jajaran Satbrimobda Jatim;  
(giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1);

m) meningkatkan

- m) meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di tempat Obvit/Obvitnas dan tempat pariwisata serta memberikan layanan pengawalan VIP;  
(giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1);
  - n) membangun sinergitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang aktif serta para penyelenggara fungsi pertahanan dan keamanan dalam negeri guna mewujudkan situasi keamanan yang kondusif;  
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1)
- 3) Mengoptimalkan kegiatan “Pemolisian Prediktif” dalam rangka Harkamtibmas guna menciptakan suasana kondusif ditengah masyarakat (cooling system) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) Pembinaan FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka mengembangkan program “Polisi RW” dan asistensi penguatan KBPPP (Keluarga Besar Putra Putri Polri);  
(giat 3133/prog Harkamtibmas/SP 1);
- b) peningkatan giat Siskamling dan Satkamling guna meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberdayakan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan yang ada dilingkungan masing-masing;  
(giat 3128/prog Harkamtibmas/SP 1);
- c) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan Kepolisian terbatas kepada BUJP, satpam dan Polsus;  
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 21, renaksi 79, 80);
- d) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan atau Patroli berdasarkan hasil pemetaan wilayah rawan gangguan Kamtibmas dan rawan bencana alam sesuai skala prioritas dalam bentuk Patroli Perintis Presisi dan Patroli Kota Presisi;  
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1);
- e) melakukan kegiatan patroli dialogis pada daerah rawan kejahatan (pemukiman, terminal, pasar, pelabuhan, dll);  
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1);
- f) melaksanakan penegakan hukum terbatas terhadap terjadinya Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang terjadi di tengah masyarakat.  
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1);
- g) pelaksanaan binluh Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas dengan

sasaran masyarakat tidak terorganisir (Kawasan Pasar, Terminal, Tempat Wisata);  
(giat 3133/prog Harkamtibmas/SP1);

h) pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan peran aktif masyarakat seperti Lomba Polisi Sahabat Anak atau Polisi Cilik usia Sekolah Dasar tingkat polres jajaran dan pelaksanaan pemilihan duta lalu lintas yang melibatkan masyarakat umum sebagai peserta dengan sasaran pelajar SMA/SMK/Sederajat dan Mahasiswa/i. (giat 3133/prog Harkamtibmas/SP1);

4) melaksanakan penanganan konflik secara humanis;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) pemberian penyuluhan kontra radikal kepada Ormas/Komunitas dengan meteri nilai nilai dasar Pancasila guna turut berpartisipasi meredam gejolak sosial yang terjadi masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial;  
(giat 3112/prog Harkamtibmas/SP 1);

b) mengoptimalkan peran para Bhabinkamtibmas dalam deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis;  
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1);

c) penggalangan terhadap individu, kelompok, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, BEM, LSM dan beberapa serikat buruh maupun media sosial serta kerja sama dengan instansi terkait.  
(giat 3112/prog Harkamtibmas/SP 1)

5) memelihara Kamseltibcarlantas untuk meningkatkan rasa aman ditengah masyarakat saat terjadi kemacetan dan jam rawan kejahatan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) meningkatkan kegiatan Patroli, penjagaan di wilayah rawan kriminalitas pada saat jam rawan serta berperan aktif mengajak masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas;  
(giat 3130, 3133/prog Harkamtibmas/SP 1);

b) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan atau Patroli berdasarkan hasil pemetaan wilayah rawan gangguan Kamtibmas dan rawan bencana alam sesuai skala prioritas dalam bentuk Patroli Perintis Presisi dan Patroli Kota Presisi;  
(giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1);

c) melanjutkan

- c) melanjutkan pelaksanaan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas dengan sasaran masyarakat terorganisir (Sopir Bus/AKDP/ Pariwisata/Gojek, Sopir Truk, Pelajar, Mahasiswa/i, TK/Paud); (giat 3130, 3133/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1);
  - d) melaksanakan kegiatan Turjawali di daerah yang rawan kriminalitas dan berperan aktif mengimbau masyarakat dalam rangka mewujudkan Kamtibmas diwilayahnya masing-masing. (giat 3133/prog Harkamtibmas/SP 1);
  - e) bekerjasama dengan stakeholder untuk melakukan review andal lalin pada objek vital sehingga dapat dilakukan langkahlangkah manajemen rekayasa lalu lintas sehingga dapat terwujud Kamseltibcarlantas; (giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1);
  - f) mengoptimalkan database tentang blackspot, troublespot, jalan rawan bencana, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kondisi jalan, dan seluruh permasalahan lalu lintas sebagai big data dalam memberikan Dikmas lantas sehingga tepat guna dan tepat sasaran; (giat 3130, 3133/prog Harkamtibmas/SP 1/);
  - h) melaksanakan Patroli Perintis Presisi dan Patroli Kota Presisi sebagai eskalasi gangguan Kamtibmas yang terjadi berdasarkan perkiraan inteljen yang ada. (giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1);
- 6) meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polda Jatim di wilayah rawan gempa dan bencana alam dan Slum area;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pelaksanaan kontinjensi dengan pergeleran pasukan dalam rangka operasi kepolisian di wilayah rawan dan bencana; (giat 3130, 5081, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 19, 20, 32 renaksi 74, 78, 129);
- b) menyiapkan personel Polda Jatim yang mampu digerakkan dalam menghadapi ketanggapsegeraan serta membangun sinergisitas kemitraan dengan stakeholders dalam penanggulangan bencana alam; (giat 5087/prog Harkamtibmas/SP 1);
- c) menyelenggarakan pelayanan bantuan kegiatan penanganan SAR terbatas oleh personil Sabhara, Brimob dan bantuan satwa dalam menghadapi ketanggapsegeraan penanggulangan bencana;

(giat 3130, 5081, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 19, 20, 32 renaksi 74, 78, 129);

- d) memetakan masyarakat Desa/wilayah rawan gempa dan bencana oleh Bhabinkamtibmas guna memudahkan identifikasi masyarakat saat dan pasca bencana;  
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1);
  - e) bersama instansi terkait melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat yang berdampak bencana;  
(giat 3072, 5076/prog Dukma/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 32, renaksi 31, 129);
  - f) mengoptimalkan pengamanan dan back up satuan kewilayahan dengan menggunakan bantuan satwa dalam rangka bantuan SAR terbatas penanganan bencana alam;  
(giat 3072, 5076/prog Dukma/SP 1/SS 1);
  - g) meningkatkan Pelatihan melalui kerjasama dengan Badan Sar Nasional dan Penggiat Komunitas SAR Pengguna Satwa, seperti BNPB Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan SAR Nasional (Basarnas), Badan SAR Daerah (Basarda);  
(giat 5087/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1);
  - h) peningkatan kerjasama Intansi, Pembinaan Jaringan dan Kemitraan, Forum Komunikasi Polisi Dan Masyarakat (FKPM), Pokdar kamtibmas dan Fokus Group Discussion FGD Mitigasi bencana wilayah;  
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1);
  - i) membentuk Tim Trauma Healing bagi korban bencana alam;  
(giat 3130, 5081/prog Harkamtibmas/SP 1);
  - j) melaksanakan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapan satwa dalambantuan SAR terbatas penanganan bencana alam.  
(giat 3130, 5081/prog Harkamtibmas/SP 1).
- 7) meningkatkan penggelaran kekuatan operasional Kepolisian di kewilayahan Polda Jatim dalam pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan menjalin sinergritas polisional dengan stakeholder terkait serta menangani gangguan keamanan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan kegiatan KRYD fungsi Binmas untuk pencegahan terhadap munculnya aliran radikalisme dan anti

pancasila serta kenakalan remaja dan gangguan Kamtibmas yang dapat meresahkan masyarakat;  
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1).

- b) penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi sesuai dengan tindakan Kepolisian yang berlaku serta mengoptimalkan kekuatan personel Polda Jatim yang mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;  
  
(giat 5079, 5080, 5087/prog 4/SP 1);
- c) meningkatkan kesiapan personel di Ditsamapta Polda Jatim untuk mampu digerakkan secara cepat dalam rangka pengamanan unjuk rasa, dan konflik sosial;  
(giat 5079, 5080, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1);
- d) melaksanakan pelayanan pengamanan unjuk rasa damai (situasi hijau) sampai unjuk rasa menyimpang (situasi kuning) dengan mengedepankan sikap humanis dan menjunjung tinggi HAM sesuai dengan ketentuan perundangundangan;  
(giat 5079, 5080, 5087/prog Harkamtibmas/SP1);
- e) menguatkan kembali sistem rayonisasi zona back up Satwil sesuai dislokasi Kompi jajaran Satbrimob Polda Jatim guna kecepatan dalam menindak lanjuti gangguan Kamtibmas;  
(giat 5087/prog Harkamtibmas/SP 1);
- f) menyiapkan pasukan sebagai Power On Hand Kapolda yang siap di gerakkan setiap saat;  
(giat 3130, 5076, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1);
- g) meningkatkan program quick response anggota Satbrimob Polda Jatim dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial;  
(giat 3130, 5076, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1).
- h) mengoptimalkan jumlah pasukan yang ada pada tiap Kompi jajaran untuk BKO Satwil dan menyisakan personil cadangan untuk status siaga on call  
(giat 3130, 5076, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1);
- i) membangun sinergitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang aktif guna mewujudkan situasi keamanan yang kondusif;  
(giat 5076, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1);
- j) memberdayakan Bhabinkamtibmas/ polisi RW untuk hadir di tengah-tengah masyarakat setiap hari guna mengajak

masyarakat

masyarakat selalu bersatu, bersinergi dan aktif dalam giat pencegahan terhadap gangguan Kamtibmas;  
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1);

k) meningkatkan kerjasama intansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan FGD, FKPM pembinaan jaringan Pok KKB, sosialisasi melalui DDS dengan masyarakat secara masiv; (giat 5076, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1).

8) meningkatkan penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polda Jatim di seluruh wilayah Jawa Timur guna mendukung terlaksananya pengamanan laut;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) meningkatkan patroli di wilayah industri (kawasan tertentu), pariwisata serta di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai dalam rangka pengamanan perairan dan penegakkan hukum di wilayah perairan Jawa Timur;  
(giat 3134, 4342/prog Harkamtibmas/SP 1);

b) peningkatan kegiatan bintibmas perairan guna menekan gangguan kamtibmas dengan memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut.  
(giat 3135/prog 4/SP 1/SS 1).

9) meningkatkan penguatan Polda Jatim dibidang keamanan pada pulau berpenghuni;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) meningkatkan kegiatan patroli wilayah rawan kriminalitas, kemacetan dan laka lantas serta obvit/obvitnas dalam rangka penguatan Polri dibidang keamanan pada pulau berpenghuni;  
(giat 3130, 3131, 3135/prog Harkamtibmas/SP 1);

b) meningkatkan pelacakan dan penangkalan ditempat keramaian, rawan kejahatan dalam rangka penguatan Polda Jatim dibidang keamanan pulau berpenghuni;  
(giat 5081/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46);

c) membangun kemampuan kolaborasi operasional Polda Jatim dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pulau terluar dan berpenghuni serta meningkatkan kegiatan pengawasan (pre-emptif, preventif dan melakukan penegakan hukum awal) terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah baik darat maupun laut.

(giat,3130,5087,3134/progHarkamtibmas/SP1).

b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas ” **Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polda Jatim yang inovatif berbasis digital**”, yaitu:

1) modernisasi sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi guna mencapai kualitas pelayanan publik Polda Jatim;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) mengoptimalkan perbaikan dan pemeliharaan alat komunikasi radio dan jaringan komunikasi data guna menjangkau jaringan komunikasi antar Polsek, Polres dan Polda;  
(giat 3071/prog Dukma/SP 2);

b) mengoptimalkan kerjasama dengan dengan instansi terkait (Pemkot Surabaya, Dishub Jatim dan PT. Telkom )  
(giat 3071/prog Dukma /SP 2);

c) penambahan dan peningkatan kapasitas Bandwidth di Mapolda Jatim, Mako Polres dan Polsek jajaran Polda Jatim;  
(giat 3071/prog Dukma /SP 2);

d) Melanjutkan inovasi layanan publik yang efisien dan terintegrasi guna mempercepat penerapan standar pelayanan minimal;  
(giat 3133, 3084/prog Harkamtibmas, prog Almatus Sarpras Polri/ SP 2).

2) meningkatkan profesionalisme anggota Polda Jatim dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polda Jatim;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) mengoptimalkan operator (out sourcing) untuk helpdesk support aplikasi Binmas Online System (BOS);  
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 2);

b) pemanfaatan BOS V2 oleh Bhabinkamtibmas dengan kegiatan: FGD Bidang Bhabinkamtibmas serta mengembangkan kemampuan sesuai Tupoksi dan pendampingan dana desa serta pencegahan pungli di wilayah hukum Polda Jatim dan melaksanakan giat Evaluasi Bhabinkamtibmas dalam

melaksanakan.....

- melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat pada penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI.  
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 2);
- c) meningkatkan optimalisasi dan inovasi sistem pelayanan secara berbasis IT dalam rangka penerbitan BPKB, STNK, SKCK, perizinan/pemberitahuan kegiatan masyarakat dan penerbitan perizinan di bidang senjata api non organik Polri/TNI dan bahan peledak komersial berupa implementasi pelayanan sesuai SOP dan perundangan yang berlaku;  
(giat 3084, 3133/prog Almatsus Sarpras Polri, prog Harkamtibmas/SP 2);
- d) membuat sistem manajemen informasi layanan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pengurusan surat ijin operasional perusahaan, pembuatan KTA satpam;  
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 2);
- e) Inventarisasi kebutuhan materiel SBST guna mendukung percepatan layanan kepada masyarakat sehingga produk layanan dapat langsung diterima oleh Masyarakat dan Menjalankan fungsi pengawasan dengan melakukan pengecekan langsung ke tempat pelayanan;  
(giat 3072/prog Dukma/SP 2);
- f) mengoptimalkan layanan unggulan Samsat MTC (MonitoringTracking Checklist) dan optimalisasi penggunaan Samsat Digital Nasional (SIGNAL) serta Optimalisasi penggunaan aplikasi SINAR (SIM online nasional) dalam pelayanan perpanjangan SIM;  
(giat 3112/prog Harkamtibmas/SP 2);
- g) Melakukan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap bulan;  
(giat 3072/prog Dukma/SP 2);
- h) meningkatkan pelayanan publik Polda Jatim dengan melaksanakan pelayanan prima dan informasi melalui aplikasi Yankes Presisi dan Rikkes berkala;  
(giat 3070/prog Dukma/SP 2);
- i) Penguatan materi “Pelayanan Publik” bagi siswa Diktuk, Prolat Fungsi Teknis Kepolisian serta Dikbangspes dengan pemanfaatan teknologi digital/IT;  
(giat 3070/prog Dukma/SP 2);
- j) melaksanakan pelatihan kompetensi secara berkala guna meningkatkan kemampuan personil dalam melaksanakan pelayanan;  
(giat 3072/prog Dukma/SP 2).

k) mengupayakan

- k) mengupayakan Sarpras Pendidikan berbasis IT melalui Polda Jatim maupun Lemdiklat Polri;  
(giat 3070/prog Dukma/SP 2).
- 3) mengoptimalkan “ketanggap segeraan” dalam melayani masyarakat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan kecepatan kehadiran Samapta mendatangi TKP didukung kesiapan sarpras yang dimiliki serta dengan koordinasi satuan fungsi terkait ( quick respons);  
(giat 3130/prog Harkamtibmas/SP 2);
- b) mengoptimalkan “respon time” dalam memberikan bantuan teknis Satwa dalam melakukan pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban;  
(giat 3072/prog Dukma/SP 2);
- c) Melaksanakan giat deteksi dini narkoba segera guna mendeteksi dampak penyalahgunaan narkoba di masyarakat;  
(giat 3073/prog Dukma/SP 2).
- d) kemudahan pemberian surat rujukan untuk FKTP ke FKTL dengan berbasis Pcare;  
(giat 3073/prog Dukma/SP 2).
- e) Melakukan penanganan bencana DVI dengan profesional dan terintegrasi.  
(giat 3073/prog Dukma/SP 2).
- c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “**Menegakkan hukum secara transparan, legal, humanis, berkeadilan dan akuntabel**”, yaitu:

- 1) Peningkatan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana terhadap empat jenis kejahatan yang meliputi kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontinjensi guna memenuhi rasa keadilan dimasyarakat Jawa Timur;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) meningkatkan dan mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi atensi publik serta penanganan dan penegakkan hukum kasus-kasus keamanan negara terkait kejahatan: Ideologi Negara, Lingkungan Hidup, Terorisme, Korupsi Narkoba, TPPU, TPPO dan Siber;

(giat 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 5083, prog Lidik Sidik /SP 3);

- b) melakukan penyelidikan yang berhubungan dengan hakikat ancaman tindak pidana terorisme, penindakan serta penyidikan tindak pidana terorisme sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;  
(giat 3143/prog Lidik Sidik/SP3);
- c) meningkatkan kerjasama antar penegak hukum di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;  
(giat 3141/prog Lidik Sidik/SP 3);
- d) melakukan penyelidikan yang terfokus pada pencegahan potensi aksi radikal, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan berbasis IT (siber);  
(giat 3145/prog Lidik Sidik/SP 3);
- e) peningkatan koordinasi keamanan laut antar penyidik dan peningkatan penegakan hukum terhadap kejahatan di wilayah hukum perairan Jatim;  
(giat 3151/prog Lidik Sidik/SP 3);
- f) melaksanakan penyelesaian perkara melalui Restorative Justice yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan;  
(giat 3130, 5083/prog Lidik Sidik/SP 3);
- g) melanjutkan pengelolaan tahanan yang tidak melanggar HAM dan mengelola inventarisasi barang bukti secara transparan dan akuntabel  
(giat 3141, 3140/prog Lidik Sidik/SP 3);
- h) mendorong kinerja penyidik/penyidik pembantu dalam menangani perkara dengan membuat rengiat sesuai RTL yang telah dibuat;  
(giat 5085/progLidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 96);
- i) meningkatkan kualitas dan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegak hukum;  
(giat 5086/progLidik Sidik/SP 3);
- j) mengikutsertakan penyidik/penyidik pembantu dalam mengikuti Dikjur/Dikbang di bidang Reserse;  
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 3);
- k) melanjutkan dan meningkatkan cakupan data serta kemampuan forensik (labfor dan inafis) dalam pemeriksaan barang bukti dan pengelolaan tempat kejadian perkara (Crime

Scene Investigation) melalui sertifikasi dan akreditasi;  
(giat 3140, 3141/prog Lidik Sidik/SP 3);

- l) penyelenggaraan laboratorium forensik dalam rangka bantuan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;  
(giat 3141/prog Lidik Sidik/SP 3).

- 2) melaksanakan pelatihan sertifikasi penyidik dalam rangka peningkatan kompetensi penyidik sesuai dengan fungsinya di era 5.0;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) Peningkatan kualitas profesi dengan mengikutsertakan penyidik/penyidik pembantu dalam mengikuti Dikjur/Dikbang sesuai fungsinya di era 5.0  
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 3);
- b) Menyelenggarakan uji kompetensi jabatan dan sertifikasi pemeriksa di bidang laboratorium forensik sesuai dengan bidangnya masing-masing  
(giat 3137/prog Lidik Sidik/SP 3);
- c) Melakukan Pelatihan dan pengembangan terhadap anggota/pemeriksa sehingga menjadi terampil dan profesional dan dapat memberikan pelayanan terbaik.  
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 3).

- 3) meningkatkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penagakan hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan peran dari wassidik guna mengawasi prses penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
(giat 3137, 5086/prog Lidik Sidik/SP 3);
- b) mempermudah akses informasi kepada masyarakat SP2HP online;  
(giat 5086/prog Lidik Sidik/SP 3);
- c) mempercepat penyelesaian perkara-perkara khususnya yang menjadi perhatian publik serta memberikan kepastian hukum dan menghindari penyidikan yang berlarut-larut serta transaksional;  
(giat 5086/prog Lidik Sidik/SP 3);



- d) melaksanakan penyelesaian perkara melalui perkara Restorative Justice yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun kepada kemanfaatan dan keadilan;  
(giat 5086/prog Lidik Sidik /SP 3);
  - e) memberikan SP2HP2 agar tidak melebihi batas waktu/ time line yang sudah ditentukan kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka;  
(giat 3137, 5086/prog Lidik Sidik/SP 3);
- 4) meningkatkan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal dalam rangka peningkatan pengawasan penyidikan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) mengintegrasikan pelayanan dan penyajian data informasi kriminal antar Satker Ditreskrim, Ditreskrimsus dan Ditresnarkoba Polda Jatim serta institusi penegak hokum lainnya yang mudah diakses oleh petugas dan masyarakat guna memudahkan identifikasi serta ungkap kasus kejahatan;  
(giat 5083/prog Lidik Sidik/SP 3);
- b) Mengoptimalkan e-MP (e- manajemen penyidikan) sebagai sarana pengawasan penyidikan oerkara dan tranparansi;  
(giat 5086/prog Lidik Sidik/SP 3);
- c) mengoptimalkan melaksanakan Gelar Perkara  
(giat 3137, 5086/prog Lidik Sidik/SP 3);
- d) mempermudah akses informasi terhadap SP2HP dan layanan publik secara online;  
(giat 5083/prog Lidik Sidik/SP 3);
- e) memperkuat kerangka regulasi penegakkan hukum.  
(giat 5083/prog Lidik Sidik/SP 3);
- f) mengedepankan fungsi Wassidik dalam upaya pelayanan penyidikan yang lebih baik;  
(giat 5085, 5086/prog Lidik Sidik/SP 3);
- g) meningkatkan penyelenggaraan pusat data informasi criminal yang terintegrasi antar CJS melalui SPPPT-TI (Sistem Penyelesaian Perkara Pidana Terpadu Berbasis IT).  
(giat 5085/prog Lidik Sidik/SP3);
- h) data.....

- h) data Dakgar lintas, data laka lintas dan data ERI yang terintegrasi dengan sistem lingkungan Polri dan institusi penegak hukum;  
(giat 5085/prog Lidik Sidik/SP 3);
- d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Mewujudkan pengelolaan SDM yang modern dan transparan serta kapasitas SDM yang cerdas, berintegrasi dan profesional”** yaitu:
- 1) Peningkatan kualitas lulusan pendidikan Diklat Polri guna mewujudkan SDM Polri yang siap pakai di era police 5.0;;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) Peningkatan kualitas lulusan pendidikan Diklat Polri guna mewujudkan SDM Polri yang siap pakai di era police 5.0;  
(giat 3096/prog profesionalisme SDM Polri/SP 4);
- b) melaksanakan seleksi bagi anggota yang akan mengikuti Diklat dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis;  
(giat 3096/prog profesionalisme SDM Polri/SP 4);
- c) menyusun Standar Biaya Khusus (SBK) untuk mendukung kegiatan Operasional Pendidikan;  
(giat 3096, 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4);
- d) meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan baik segi kualitas maupun kuantitas;  
(giat 3096/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4);
- e) penguatan materi “Revolusi Mental” bagi siswa Diktuk BA Polri;  
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4);
- f) mengusulkan “uji sertifikasi Profesi Gadik” guna kelayakan dan legalitas personel pada Proses Belajar Mengajar.  
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4).
- 2) mengoptimalkan penggunaan aplikasi Analisa Beban Kinerja (ABK), Sistem Informasi Klasifikasi Kesatuan Kewilayahan (SIK3) dan pengembangan struktur organisasi Polri;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan pengkajian klasifikasi struktur organisasi Polda Jatim di tingkat kesatuan kewilayahan dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIK3;  
(giat 3037/prog Dukma/SP 4);
- h) mengoptimalka

- b) mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar Susunan Personel (DSP) disetiap satker dengan melakukan kajian kelembagaan baik bidang pembinaan maupun bidang operasional;  
(giat 3037/prog Dukma/SP 4);
  - c) melanjutkan penyusunan manajemen talenta persiapan kader unggul yang dapat berkompetitif;  
(giat3108/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4);
  - d) melanjutkan penyiapan kader pimpinan Polri yang bersih dan bebas dari praktik KKN;  
(giat 3108/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4);
  - e) melaksanakan penempatan personel sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi.  
(giat 3108/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4).
- 3) meningkatkan SDM Polda Jatim yang unggul di era police 5.0;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) merencanakan rekrutmen PNPP sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada untuk kebutuhan organisasi secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis serta clear and clean dengan menggunakan Computer Asisted Test (CAT);  
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4);
- b) melaksanakan rekrutmen anggota Polri secara proaktif dan terpadu berbasis TI (affirmative action, talent scouting dan reward);  
(giat 3100, 3108/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4);
- c) melaksanakan seleksi Dikbang PNPP sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada untuk meningkatkan kompetensinya dengan menerapkan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis;  
(giat 3108/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4);
- d) peningkatan profesionalisme SDM Polda Jatim dengan mengikutsertakan pada pelatihan IT di era police 5.0;  
(giat 3096 /prog Profesionalisme SDM Polri/ SP 4);
- e) penguatan kegiatan pembinaan Rohani, mental dan menjaga kualitas kebugaran melalui TKJ berkala.  
(giat 3096 /prog Profesionalisme SDM Polri/ SP 4);

4) melaksanakan

4) melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) mengintegrasikan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) online dengan Sistem Informasi Personel Polri (SIPP) berbasis TI untuk membenahi database SDM Polda Jatim berupa pendataan ulang Polri dan PNS secara elektronik sehingga senantiasa up to date;  
(giat 3096, 3108/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4);
- b) penguatan sistem penilaian kompetensi Polri (kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi etik) yang komprehensif melingkupi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna mendukung “program manajemen talenta”;  
(giat 3100, 3105, 3108, 3110/prog Profesionalisme SDM Polri /SP 4);
- c) penguatan standar penilaian kompetensi serta meningkatkan “sistem reward and punishment”;  
(giat 3108/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4);
- d) meningkatkan jumlah asesor sertifikasi kompetensi;  
(giat 3100, 3108, 5076/prog Profesionalisme SDM Polri, Harkamtibmas/SP 4);

5) meningkatkan kesejahteraan, pelayanan dan fasilitas kesehatan, perumahan serta keselamatan bagi aparaturnya Polri dan keluarganya di Polda Jatim.

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan pelayanan administrasi pegawai berkaitan dengan BPJS, asuransi Jamkestama dan dalam pemenuhan perumahan ASABRI dan YKPP (Yayasan Kesejahteraan Perumahan dan Pendidikan) bagi anggota Polri/PNS;  
(giat 3072, 3105/prog Dukma, prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4);
- b) Melaksanakan kerja sama dengan pengembang / developer tentang pengadaan perumahan ASABRI dan memberikan kemudahan terkait bantuan uang muka ASABRI;  
(giat 3072, 3105/prog Dukma, Profesionalisme SDM Polri/SP 4);
- c) peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara melalui standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS

Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS);  
(giat 3072, 5062/prog Dukma, prog Almatsus Sarpras Polri/SP 4);

- d) meningkatkan pelayanan kesehatan promotif, preventif, deteksi, kuratif, rehabilitatif secara paliatif.  
(giat 3072/prog Dukma/SP 4);
- e) melaksanakan pemenuhan hak-hak personel secara layak dan pelatihan kewirausahaan menjelang purna tugas;  
(giat 3105/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4);
- f) optimalisasi aplikasi e.Yankes terkait kecepatan informasi dan pelayanan bagi;  
(giat 3072/prog Dukma/SP 4);
- g) optimalisasi penyelesaian anggota yang bermasalah melalui program BERITA (Badan Penyelesaian Permasalahan Anggota Polri);  
(giat 3105, 3107/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4);
- h) pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL);  
(giat 3072, 5062/prog Dukma, prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 4);
- i) peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik pada tingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparaturnya Polri dan masyarakat umum;  
(giat 3072, 5062/prog Dukma, prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/ SP 4).

e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“pemenuhan sarana prasarana, almatsus polri dan fasilitas konstruksi polda jatim yg modern dan memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi berbasis Minimum Esensial Police Equipment (MEPE)”**, yaitu:

- 1) pemenuhan Sarpras dan perlengkapan Almatsus Polda Jatim yang modern sesuai dengan teknologi terkini guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melakukan inventarisasi kondisi riil Alparkam dan Almatsus Polda Jatim dan jajaran;  
(giat 5060, 5051/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5);

b) melakukan

- b) melakukan evaluasi pengusulan pemenuhan kebutuhan perlengkapan Alpalkam, Almatsus dan infrastruktur TIK Polda Jatim dengan skala prioritas;  
(giat 5059/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri /SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 10, renaksi 37, 38);
- c) mendistribusikan Alpalkam dan Almatsus sesuai dengan peruntukannya;  
(giat 5059, 3084/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/IKP4 /PPK prog 4, 11, giat 9, 10, 37, 40 renaksi 34, 37, 38, 45, 115, 135, 144);
- d) melakukan rekapitulasi pendistribusian materiil logistik dan infrastruktur TIK;  
(giat 5059/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/ IKP 4/PPK prog 4, giat 10,renaksi 37, 38);
- e) melakukan usulan penghapusan Almatsus dan infrastruktur TIK yang kondisinya rusak berat;  
(giat 5059/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri /SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 9, 10, renaksi 34, 39, 40);
- f) mengajukan rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus dari satker Polda Jatim dan jajaran.  
(giat 5059, 3084/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/ IKP4//PPK prog 4, giat 10, renaksi 39, 42).
- g) pemenuhan Almatsus Polri yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam  
rangka penanganan PPA, penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial, lawan insujensi dan pemeliharaan keamanan;  
(giat 3084, 5059, 5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5);
- h) melanjutkan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polri (Min dan Maks);  
(giat 5059/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5);
- i) melakukan pelatihan dan pemberdayaan anggota Biddokkes dalam kesiapsiagaan dalam pengamanan PNPP maupun masyarakat di bidang kesehatan dengan peralatan kesehatan yang terkini dan modern;  
(giat 5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/ SP5);
- j) Pembenahan sarana dan prasarana, SDM, jenis dan komitmen pelayanan FKTP Polri sesuai standar dan menyiapkan FKTP Polri yang terakreditasi dengan norma kapitasi dan kepesertaan tertinggi;  
(giat 5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5);
- k) membangun

- k) membangun dan mengembangkan sistem komunikasi di wilayah pulau terluar dan wilayah rawan bencana;  
(giat 3084, 5059, 5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5);
  - l) meningkatkan layanan darurat/Hotline Kepolisian dengan nomor tunggal (110) dalam rangka merespon dengan cepat pengaduan masyarakat;  
(giat 5059/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5);
  - m) revitalisasi Command Center dalam satu sistem informasi yang terintegrasi dengan CCTV Dishub, Pemkab dan Pemkot di wilayah Pemprov Jatim;  
(giat 3084, 5059, 5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5);
  - n) melakukan pembaruan dan peningkatan kemampuan kapasitas perangkat TIK untuk menunjang giat operasi Kepolisian di wilayah Jawa Timur.  
(giat 3084, 5059, 5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5).
- 2) peningkatan pemenuhan rumah dinas pegawai Polri dan pembangunan fasilitas perkantoran di Polda Jatim dan rumah dinas di wilayah pulau terluar berpenghuni;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) menginventarisir kebutuhan perumahan dinas dan fasilitas perkantoran;  
(giat 5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri /SP 5);
- b) mengajukan rencana kebutuhan anggaran untuk pembangunan rumah dinas pegawai Polri dan fasilitas perkantoran Polda Jatim;  
(giat 5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP5);
- c) melanjutkan pembangunan rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya yang dekat dengan tempat tinggal personel dan masyarakat guna mendukung “Reformasi Sistem Kesehatan Nasional”;  
(giat 5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/ SP5);
- d) melanjutkan pembangunan fasilitas perkantoran dan Rumdin guna mempercepat pembangunan secara selektif prioritas dan berkelanjutan;  
(giat5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP5).

### 3) pembangunan

- 3) pembangunan dan penyatuan sistem informasi Kepolisian yang terintegrasi;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melanjutkan penataan infrastruktur layanan darurat/hotline Kepolisian secara bertahap dengan nomor tunggal dalam rangka merespon dengan cepat pengaduan masyarakat; (giat 5059/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/);
- b) menyediakan sarana dan prasarana yang modern dan memiliki spesifikasi serta kemampuan teknologi terkini; (giat 5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/);
- c) membangun dan mengembangkan sistem aplikasi Kepolisian yang terpadu dan satu data Polri. (giat 3084, 5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/);

- f. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Meningkatkan Budaya Integritas, Akuntabilitas dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian”**, yaitu:

- 1) melanjutkan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis online;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) memaksimalkan sistem Aplikasi E-Dumas Presisi dalam menindaklanjuti Dumas yang diterima dari masyarakat secara cepat dan tepat; (giat 3091/prog Dukma/SP 6/);
- b) memaksimalkan peranoperator untuk menindaklanjuti dan menjawab pengaduan yangmasuk melalui aplikasi dumas presisi; (giat 3091/prog Dukma/SP 6/);
- c) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online (WhatsApp, Facebook, Instagram dan email) dengan pengaduan dan pelayanan Itwasda, Bidpropam dan Bagwasidik Polda Jatim; (giat 3091, 3090, 3089, 3120/prog Dukma, prog Harkamtibmas/SP 6/);
- d) monitoring, evaluasi dan klarifikasi penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat secara terpadu; (giat 3091, 3089, 3090/prog Dukma/SP 6/);



- e) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor / korban dan tersangka;  
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
  - f) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar;  
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
  - g) mengoptimalkan dan mengIntegrasikan system penanganan pengaduan masyarakat melalui e-Dumasan;  
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
  - h) mengembangkan system pengawasan penyidikan secara elektronik (e-penyidikan);  
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
  - i) pemasangan perangkat keras (Hardware) dan perangkat lunak (Software) terkait rekrutmen Pendidikan pembentukan serta terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan publik;  
(giat 3091/prog Dukma/SP 6).
- 2) meningkatkan pencegahan korupsi di internal Polda Jatim;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) Pelaksanaan asistensi pelaporan LHKPN pada aplikasi ELHKPN dan LHKASN pada aplikasi Siharka para wajib lapor di lingkungan Polda Jatim.  
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
  - b) Pelaksanaan Sosialisasi dan Asistensi Perkap Nomor 8 tahun 2017 tentang LHKPN,Perkap Nomor 9 tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri dan Perkap Nomor 10 tahun 2017 tentang Kepemilikan Barang Mewah Bagi Anggota Polri dan PNS Polri;  
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
  - c) meningkatkan kualitas dan kapabilitas APiP dalam upaya mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi;  
(giat 3091/prog Dukma /SP 6);
  - d) Meningkatkan pengawasan melekat terhadap anggota Polri yang memegang jabatan operasional atau pelaksana tugas operasional;

(giat 3068, 3091/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 8/PPK prog 15, giat 48, renaksi 168,169);

- e) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan korupsi;  
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
- f) melaksanakan peningkatan pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara dilingkungan Polda Jatim secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;  
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
- g) meningkatkan kualitas pemantauan tindak lanjut dari hasil pengawasan pengelolaan keuangan negara melalui pengimplementasian monitoring dan evaluasi dengan sistem informasi yang terintegrasi;  
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
- h) melaksanakan supervisi dan asistensi terkait pengelolaan keuangan Negara di Satker jajaran Polda Jatim.  
(giat 3091/prog Dukma/SP 6).

- 3) meningkatkan tatakelola manajemen keuangan, perencanaan dan penganggaran Polda Jatim yang efektif, efisien dan akuntabel;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan agar tidak salah sasaran;  
(giat 5051/prog Dukma/SP 6);
- b) mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam memanfaatkan kekuatannya untuk meminimalkan kelemahannya guna meminimalisir kegagalan;  
(giat 5062/prog Dukma/SP 6);
- c) melaksanakan proses perencanaan sesuai timeline yang ada dengan mematuhi peraturan yang berlaku, dengan memperhatikan output dan outcome untuk mencapai anggaran yang berbasis kinerja;  
(giat 5051/prog Dukma/SP 6);
- d) meningkatkan sinergitas dalam menyusun produk perencanaan Polda Jatim guna mensinkronisasi pembangunan di Polda Jatim agar semakin berkualitas;  
(giat 5051/prog Dukma/SP 6);

e) melaksanakan.....

- e) melaksanakan dan meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri Semester dan Tahunan;  
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
  - f) melaksanakan Analisa dan Evaluasi setiap kegiatan baik dibidang operasional dan pembinaan, sebagai tolak ukur pelaksanaan tugas Kepolisian.  
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
- 4) Menata kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri yang efektif dan efisien;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) Melaksanakan pengkajian klasifikasi struktur organisasi Polda Jatim di tingkat kesatuan kewilayahan dengan mengoptimalkan pengimputan data dalam aplikasi SIK3);  
(giat 5052/prog Dukma/SP 6);
  - b) Mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan DSP disetiap Satker dengan melakukan kajian kelembagaan baik bidang pembinaan maupun operasional;  
(giat 5052/prog Dukma/SP 6).
- 5) meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri di lingkungan Polda Jatim.;;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) Mengusulkan seluruh Satwil bisa terkoneksi dgn SIPP (Kemenpan) agar peningkatan pelayanan publik termonitor keseluruhan;  
(giat 5053/prog Dukma/SP 6);
- b) Mengusulkan Satker dan Personil yang berpredikat WBK/WBBM dan Inovator Yanlik untuk mendapatkan Reward berupa penghargaan atau pendidikan dll;  
(giat 5053/prog Dukma/SP 6);
- c) monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan Kepolisian pada pelayanan publik;  
(giat 5053/prog Dukma/SP 6);

d) ter...

- d) terus mendorong Satker berinovasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan pelayanan publik di wilayahnya.  
(giat 5053/prog Dukma/SP 6);

## 2. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Sampang Tahun 2025

- a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Memelihara kamtibmas di wilayah Sampang secara proaktif guna menciptakan rasa aman masyarakat di wilayah Sampang”**, yaitu:

- 1) Meningkatkan penguatan peran Polres Sampang dalam menjaga Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) memetakan potensi gangguan, terorisme, aksi radikal, konflik sosial, dan situasi gangguan Kamtibmas lainnya;  
(giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog Harkamtibmas/SP1);
- b) melakukan Lidikpamgal dengan fokus pada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;  
(giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog Harkamtibmas/SP 1);

- 2) Menurunkan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang produktif;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) meningkatkan pembinaan dan penyuluhan serta sambang dalam memberikan konsultan dalam pemecahan masalah yang terjadi ditengah masyarakat;  
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1);
- b) Pemberdayaan potensi masyarakat sebagai antisipasi terhadap gangguan Kamtibmas lainnya (Narkoba, Terorisme, Kejahatan Konvensional lainnya, dll).  
(giat 5076/prog Harkamtibmas /SP 1);
- c) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerjasama dengan instansi terkait serta pemanfaatan mantan teroris yang sudah Pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal dan deradikalisasi;  
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1);

d) menetralkan

- d) menetralsir dan menekan isu serta berita negatif yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas;  
(giat 3149/prog Dukma/SP 1);
  - e) peningkatan kegiatan bintibmas masyarakat pesisir guna menekan gangguan terorisme dengan memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut;  
(giat 3155/prog Harkamtibmas/SP 1);
  - f) meningkatkan pembinaan dan penyuluhan serta sambang kepada kelompok kontra radikal dan kepada masyarakat terkait pencegahan kejahatan;  
(giat 3149/prog Dukma/SP 1);
  - g) melaksanakan Patroli secara berkala dan continue pada daerah rawan gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polres Sampang;  
(giat 3130/prog Harkamtibmas/SP 1);
  - h) Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan risk assesmen pada obyek vital nasional dan obyek tertentu  
(giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1/);
  - i) meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di tempat Obvit/Obvitnas dan tempat pariwisata serta memberikan layanan pengawalan VIP;  
(giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1);
  - j) membangun sinergitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang aktif serta para penyelenggara fungsi pertahanan dan keamanan dalam negeri guna mewujudkan situasi keamanan yang kondusif;  
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1)
- 3) Mengoptimalkan kegiatan “Pemolisian Prediktif” dalam rangka Harkamtibmas guna menciptakan suasana kondusif ditengah masyarakat (cooling system) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) peningkatan giat Siskamling dan Satkamling guna meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberdayakan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan yang ada dilingkungan masing-masing;  
(giat 3128/prog Harkamtibmas/SP 1);
- b) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan Kepolisian terbatas kepada BUJP, satpam dan Polsus;

(gi-<sup>4</sup>

(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 21, renaksi 79, 80);

- c) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan atau Patroli berdasarkan hasil pemetaan wilayah rawan gangguan Kamtibmas dan rawan bencana alam sesuai skala prioritas dalam bentuk Patroli Perintis Presisi dan Patroli Kota Presisi; (giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1);
  - d) melakukan kegiatan patroli dialogis pada daerah rawan kejahatan (pemukiman, terminal, pasar, pelabuhan, dll); (giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1);
  - e) melaksanakan penegakan hukum terbatas terhadap terjadinya Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang terjadi di tengah masyarakat. (giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1);
  - f) pelaksanaan binluh Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas dengan sasaran masyarakat tidak terorganisir (Kawasan Pasar, Terminal, Tempat Wisata); (giat 3133/prog Harkamtibmas/SP1);
- 4) melaksanakan penanganan konflik secara humanis;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pemberian penyuluhan kontra radikal kepada Ormas/Komunitas dengan meteri nilai nilai dasar Pancasila guna turut berpartisipasi meredam gejolak sosial yang terjadi masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial; (giat 3112/prog Harkamtibmas/SP 1);
  - b) mengoptimalkan peran para Bhabinkamtibmas dalam deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis; (giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1);
  - c) penggalangan terhadap individu, kelompok, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, BEM, LSM dan beberapa serikat buruh maupun media sosial serta kerja sama dengan instansi terkait. (giat 3112/prog Harkamtibmas/SP 1)
- 5) memelihara Kamseltibcarlantas untuk meningkatkan rasa aman ditengah masyarakat saat terjadi kemacetan dan jam rawan kejahatan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a)meningkatkan

- a) meningkatkan kegiatan Patroli, penjagaan di wilayah rawan kriminalitas pada saat jam rawan serta berperan aktif mengajak masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas;  
(giat 3130, 3133/prog Harkamtibmas/SP 1);
  - b) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan atau Patroli berdasarkan hasil pemetaan wilayah rawan gangguan Kamtibmas dan rawan bencana alam sesuai skala prioritas dalam bentuk Patroli Perintis Presisi dan Patroli Kota Presisi;  
(giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1);
  - c) melanjutkan pelaksanaan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas dengan sasaran masyarakat terorganisir (Sopir Bus/AKDP/ Pariwisata/Gojek, Sopir Truk, Pelajar, Mahasiswa/i, TK/Paud); (giat 3130, 3133/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1);
  - d) melaksanakan kegiatan Turjawali di daerah yang rawan kriminalitas dan berperan aktif mengimbau masyarakat dalam rangka mewujudkan Kamtibmas diwilayahnya masing-masing.  
(giat 3133/prog Harkamtibmas/SP 1);
  - e) bekerjasama dengan stakeholder untuk melakukan review andal lalin pada objek vital sehingga dapat dilakukan langkahlangkah manajemen rekayasa lalu lintas sehingga dapat terwujud Kamseltibcarlantas;  
(giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1);
  - f) mengoptimalkan database tentang blackspot, troublespot, jalan rawan bencana, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kondisi jalan, dan seluruh permasalahan lalu lintas sebagai big data dalam memberikan Dikmas lantas sehingga tepat guna dan tepat sasaran;  
(giat 3130, 3133/prog Harkamtibmas/SP 1/);
  - h) melaksanakan Patroli Perintis Presisi dan Patroli Kota Presisi sebagai eskalasi gangguan Kamtibmas yang terjadi berdasarkan perkiraan inteljen yang ada.  
(giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1);
- 6) meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polres Sampang di wilayah rawan gempa dan bencana alam dan Slum area;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pelaksanaan kontinjensi dengan pergelaran pasukan dalam rangka operasi kepolisian di wilayah rawan dan bencana;  
(giat 3130, 5081, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 19, 20, 32 renaksi 74, 78, 129);

- b) menyiapkan personel Polres Sampang yang mampu digerakkan dalam menghadapi ketanggapsegeraan serta membangun sinergisitas kemitraan dengan stakeholders dalam penanggulangan bencana alam;  
(giat 5087/prog Harkamtibmas/SP 1);
  - c) memetakan masyarakat Desa/wilayah rawan gempa dan bencana oleh Bhabinkamtibmas guna memudahkan identifikasi masyarakat saat dan pasca bencana;  
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1);
  - d) bersama instansi terkait melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat yang berdampak bencana;  
(giat 3072, 5076/prog Dukma/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 32, renaksi 31, 129);
  - e) mengoptimalkan pengamanan dan back up satuan kewilayahan dengan menggunakan bantuan satwa dalam rangka bantuan SAR terbatas penanganan bencana alam;  
(giat 3072, 5076/prog Dukma/SP 1/SS 1);
  - f) peningkatan kerjasama Intansi, Pembinaan Jaringan dan Kemitraan, Forum Komunikasi Polisi Dan Masyarakat (FKPM), Pokdar kamtibmas dan Fokus Group Discussion FGD Mitigasi bencana wilayah;  
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1);
  - g) membentuk Tim Trauma Healing bagi korban bencana alam;  
(giat 3130, 5081/prog Harkamtibmas/SP 1);
  - h) melaksanakan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapan satwa dalambantuan SAR terbatas penanganan bencana alam.  
(giat 3130, 5081/prog Harkamtibmas/SP 1).
- 7) meningkatkan penggelaran kekuatan operasional Kepolisian di kewilayahan Polres Sampang dalam pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan menjalin sinergitas polisional dengan stakeholder terkait serta menangani gangguan keamanan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan kegiatan KRYD fungsi Binmas untuk pencegahan terhadap munculnya aliran radikalisme dan anti pancasila serta kenakalan remaja dan gangguan Kamtibmas yang dapat meresahkan masyarakat;  
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1).
- b) penanggulangan;

- b) penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi sesuai dengan tindakan Kepolisian yang berlaku serta mengoptimalkan kekuatan personel Polres Sampang yang mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;  
(giat 5079, 5080, 5087/prog 4/SP 1);
  - c) meningkatkan kesiapan personel di Satsamapta Polres Sampang untuk mampu digerakkan secara cepat dalam rangka pengamanan unjuk rasa, dan konflik sosial;  
(giat 5079, 5080, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1);
  - d) melaksanakan pelayanan pengamanan unjuk rasa damai (situasi hijau) sampai unjuk rasa menyimpang (situasi kuning) dengan mengedepankan sikap humanis dan menjunjung tinggi HAM sesuai dengan ketentuan perundangundangan;  
(giat 5079, 5080, 5087/prog Harkamtibmas/SP1);
  - e) memberdayakan Bhabinkamtibmas/ polisi RW untuk hadir di tengah-tengah masyarakat setiap hari guna mengajak masyarakat selalu bersatu, bersinergi dan aktif dalam giat pencegahan terhadap gangguan Kamtibmas;  
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1);
  - f) meningkatkan kerjasama intansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan FGD, FKPM pembinaan jaringan Pok KKB, sosialisasi melalui DDS dengan masyarakat secara masiv; (giat 5076, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1).
- 8) meningkatkan penguatan Polres Sampang dibidang keamanan pada pulau berpenghuni;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) meningkatkan kegiatan patroli wilayah rawan kriminalitas, kemacetan dan laka lantas serta obvit/obvitnas dalam rangka penguatan Polri dibidang keamanan pada pulau berpenghuni;  
(giat 3130, 3131, 3135/prog Harkamtibmas/SP 1);
- b) meningkatkan pelacakan dan penangkalan ditempat keramaian, rawan kejahatan dalam rangka penguatan Polres Sampang dibidang keamanan pulau berpenghuni;  
(giat 5081/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46);
- c) membangun kemampuan kolaborasi operasional Polres Sampang dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pulau terluar dan berpenghuni serta meningkatkan kegiatan pengawasan (pre-emptif, preventif

dan melakukan penegakan hukum awal) terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah baik darat maupun laut; (giat,3130,5087,3134/progHarkamtibmas/SP1).

b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas ” **Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polres Sampang yang inovatif berbasis digital**”, yaitu:

- 1) modernisasi sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi guna mencapai kualitas pelayanan publik Polres Sampang;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) mengoptimalkan perbaikan dan pemeliharaan alat komunikasi radio dan jaringan komunikasi data guna menjangkau jaringan komunikasi antar Polsek dan Polres; (giat 3071/prog Dukma/SP 2);
- b) Melanjutkan inovasi layanan publik yang efisien dan terintegrasi guna mempercepat penerapan standar pelayanan minimal; (giat 3133, 3084/prog Harkamtibmas, prog Almatsus Sarpras Polri/ SP 2).

- 2) meningkatkan profesionalisme anggota Polres Sampang dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polres Sampang;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pemanfaatan BOS V2 oleh Bhabinkamtibmas dengan kegiatan: FGD Bidang Bhabinkamtibmas serta mengembangkan kemampuan sesuai Tupoksi dan pendampingan dana desa serta pencegahan pungli di wilayah hukum Polda Jatim dan melaksanakan giat Evaluasi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat pada penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI. (giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 2);
- b) meningkatkan optimalisasi dan inovasi sistem pelayanan secara berbasis IT dalam rangka penerbitan BPKB, STNK, SKCK, perizinan/pemberitahuan kegiatan masyarakat dan penerbitan perizinan di bidang senjata api non organik Polri/TNI dan bahan peledak komersial berupa implementasi pelayanan sesuai SOP dan perundangan yang berlaku;

(giat.....

- (giat 3084, 3133/prog Almatsus Sarpras Polri, prog Harkamtibmas/SP 2);
- c) membuat sistem manajemen informasi layanan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pengurusan surat ijin operasional perusahaan, pembuatan KTA satpam;  
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 2);
  - d) Inventarisasi kebutuhan materiel SBST guna mendukung percepatan layanan kepada masyarakat sehingga produk layanan dapat langsung diterima oleh Masyarakat dan Menjalankan fungsi pengawasan dengan melakukan pengecekan langsung ke tempat pelayanan;  
(giat 3072/prog Dukma/SP 2);
  - e) mengoptimalkan layanan unggulan Samsat MTC (MonitoringTracking Checklist) dan optimalisasi penggunaan Samsat Digital Nasional (SIGNAL) serta Optimalisasi penggunaan aplikasi SINAR (SIM online nasional) dalam pelayanan perpanjangan SIM;  
(giat 3112/prog Harkamtibmas/SP 2);
  - f) Melakukan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap bulan;  
(giat 3072/prog Dukma/SP 2);
  - g) meningkatkan pelayanan publik Polres Sampang dengan melaksanakan pelayanan prima dan informasi melalui aplikasi Yankes Presisi dan Rikkas berkala;  
(giat 3070/prog Dukma/SP 2);
  - h) melaksanakan pelatihan kompetensi secara berkala guna meningkatkan kemampuan personil dalam melaksanakan pelayanan;  
(giat 3072/prog Dukma/SP 2).
- 3) mengoptimalkan “ketanggap segera” dalam melayani masyarakat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) meningkatkan kecepatan kehadiran Samapta mendatangi TKP didukung kesiapan sarpras yang dimiliki serta dengan koordinasi satuan fungsi terkait ( quick respons);  
(giat 3130/prog Harkamtibmas/SP 2);
- b) Melaksanakan giat deteksi dini narkoba segera guna mendeteksi dampak penyalahgunaan narkoba di masyarakat;  
(giat 3073/prog Dukma/SP 2).

c)kemudahan.....

- c) kemudahan pemberian surat rujukan untuk FKTP ke FKTL dengan berbasis Pcare; (giat 3073/prog Dukma/SP 2).
- c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Menegakkan hukum secara transparan, legal, humanis, berkeadilan dan akuntabel”**, yaitu:

- 2) Peningkatan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana terhadap empat jenis kejahatan yang meliputi kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontinjensi guna memenuhi rasa keadilan dimasyarakat Sampang;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) meningkatkan dan mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi atensi publik serta penanganan dan penegakkan hukum kasus-kasus keamanan negara terkait kejahatan: Ideologi Negara, Lingkungan Hidup, Terorisme, Korupsi Narkoba, TPPU, TPPO dan Siber; (giat 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 5083, prog Lidik Sidik /SP 3);
- b) melakukan penyelidikan yang berhubungan dengan hakikat ancaman tindak pidana terorisme, penindakan serta penyidikan tindak pidana terorisme sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; (giat 3143/prog Lidik Sidik/SP3);
- c) meningkatkan kerjasama antar penegak hukum di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; (giat 3141/prog Lidik Sidik/SP 3);
- d) melakukan penyelidikan yang terfokus pada pencegahan potensi aksi radikal, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan berbasis IT (siber); (giat 3145/prog Lidik Sidik/SP 3);
- e) peningkatan koordinasi keamanan laut antar penyidik dan peningkatan penegakan hukum terhadap kejahatan di wilayah hukum perairan Sampang; (giat 3151/prog Lidik Sidik/SP 3);
- f) melaksanakan penyelesaian perkara melalui Restorative Justice yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan; (giat 3130, 5083/prog Lidik Sidik/SP 3);

g)melanjutka...

- g) melanjutkan pengelolaan tahanan yang tidak melanggar HAM dan mengelola inventarisasi barang bukti secara transparan dan akuntabel  
(giat 3141, 3140/prog Lidik Sidik/SP 3);
  - h) mendorong kinerja penyidik/penyidik pembantu dalam menangani perkara dengan membuat rengiat sesuai RTL yang telah dibuat;  
(giat 5085/progLidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 96);
  - i) meningkatkan kualitas dan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegak hukum;  
(giat 5086/progLidik Sidik/SP 3);
  - j) mengikutsertakan penyidik/penyidik pembantu dalam mengikuti Dikjur/Dikbang di bidang Reserse;  
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 3);
  - k) melanjutkan dan meningkatkan cakupan data serta kemampuan forensik (labfor dan inafis) dalam pemeriksaan barang bukti dan pengelolaan tempat kejadian perkara (Crime Scene Investigation) melalui sertifikasi dan akreditasi;  
(giat 3140, 3141/prog Lidik Sidik/SP 3);
- 2) melaksanakan pelatihan sertifikasi penyidik dalam rangka peningkatan kompetensi penyidik sesuai dengan fungsinya di era 5.0;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) Peningkatan kualitas profesi dengan mengikutsertakan penyidik/penyidik pembantu dalam mengikuti Dikjur/Dikbang sesuai fungsinya di era 5.0  
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 3);
  - b) Melakukan Pelatihan dan pengembangan terhadap anggota/pemeriksa sehingga menjadi terampil dan profesional dan dapat memberikan pelayanan terbaik.  
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 3).
- 3) meningkatkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penagakan hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan peran dari wassidik guna mengawasi prses penyidi

agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
(giat 3137, 5086/prog Lidik Sidik/SP 3);

- b) mempermudah akses informasi kepada masyarakat SP2HP online;  
(giat 5086/prog Lidik Sidik/SP 3);
  - c) mempercepat penyelesaian perkara-perkara khususnya yang menjadi perhatian publik serta memberikan kepastian hukum dan menghindari penyidikan yang berlarut-larut serta transaksional;  
(giat 5086/prog Lidik Sidik/SP 3);
  - d) melaksanakan penyelesaian perkara melalui perkara Restorative Justice yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun kepada kemanfaatan dan keadilan;  
(giat 5086/prog Lidik Sidik /SP 3);
  - e) memberikan SP2HP2 agar tidak melebihi batas waktu/ time line yang sudah ditentukan kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka;  
(giat 3137, 5086/prog Lidik Sidik/SP 3);
- 4) meningkatkan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal dalam rangka peningkatan pengawasan penyidikan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) mengintegrasikan pelayanan dan penyajian data informasi kriminal antar Satreskrim dan Satresnarkoba Polres Sampang serta institusi penegak hokum lainnya yang mudah diakses oleh petugas dan masyarakat guna memudahkan identifikasi serta ungkap kasus kejahatan;  
(giat 5083/prog Lidik Sidik/SP 3);
- b) Mengoptimalkan e-MP (e- manajemen penyidikan) sebagai sarana pengawasan penyidikan oerkara dan transparansi;  
(giat 5086/prog Lidik Sidik/SP 3);
- c) mengoptimalkan pelaksanaan Gelar Perkara  
(giat 3137, 5086/prog Lidik Sidik/SP 3);
- d) mempermudah akses informasi terhadap SP2HP dan layanan publik secara online;  
(giat 5083/prog Lidik Sidik/SP 3);
- e) memperkuat kerangka regulasi penegakkan hukum.

(giat 5083/prog Lidik Sidik/SP 3);

- f) mengedepankan fungsi Wassidik dalam upaya pelayanan penyidikan yang lebih baik;  
(giat 5085, 5086/prog Lidik Sidik/SP 3);
- g) meningkatkan penyelenggaraan pusat data informasi criminal yang terintegrasi antar CJS melalui SPPPT-TI (Sistem Penyelesaian Perkara Pidana Terpadu Berbasis IT).  
(giat 5085/prog Lidik Sidik/SP3);
- h) data Dakgar lantasi, data laka lantasi dan data ERI yang terintegrasi dengan sistem lingkungan Polri dan institusi penegak hukum;  
(giat 5085/prog Lidik Sidik/SP 3);

d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Mewujudkan pengelolaan SDM yang modern dan transparan serta kapasitas SDM yang cerdas, berintegrasi dan profesional”** yaitu:

- 1) mengoptimalkan penggunaan aplikasi Analisa Beban Kinerja (ABK), Sistem Informasi Klasifikasi Kesatuan Wilayah (SIK3) dan pengembangan struktur organisasi Polri;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan pengkajian klasifikasi struktur organisasi Polda Jatim di tingkat kesatuan wilayah dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIK3;  
(giat 3037/prog Dukma/SP 4);
- b) mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar Susunan Personel (DSP) disetiap satker dengan melakukan kajian kelembagaan baik bidang pembinaan maupun bidang operasional;  
(giat 3037/prog Dukma/SP 4);
- c) melaksanakan penempatan personel sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi.  
(giat 3108/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4).

- 3) meningkatkan SDM Polres Sampang yang unggul di era police 5.0;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) penguatan kegiatan pembinaan Rohani, mental dan menjaga kualitas kebugaran melalui TKJ berkala.

(giat 3096 /prog Profesionalisme SDM Polri/ SP 4);

- 4) melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mengintegrasikan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) online dengan Sistem Informasi Personel Polri (SIPP) berbasis TI untuk membenahi database SDM Polres Sampang berupa pendataan ulang Polri dan PNS secara elektronik sehingga senantiasa up to date;  
(giat 3096, 3108/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4);
  - b) penguatan sistem penilaian kompetensi Polri (kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi etik) yang komprehensif melingkupi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna mendukung “program manajemen talenta”;  
(giat 3100, 3105, 3108, 3110/prog Profesionalisme SDM Polri /SP 4);
  - c) penguatan standar penilaian kompetensi serta meningkatkan “sistem reward and punishment”;  
(giat 3108/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4);
  - d) meningkatkan jumlah asesor sertifikasi kompetensi;  
(giat 3100, 3108, 5076/prog Profesionalisme SDM Polri, Harkamtibmas/SP 4);
- 5) meningkatkan kesejahteraan, pelayanan dan fasilitas kesehatan, perumahan serta keselamatan bagi aparaturnya Polri dan keluarganya di Polres Sampang.

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan pelayanan administrasi pegawai berkaitan dengan BPJS, asuransi Jamkestama dan dalam pemenuhan perumahan ASABRI dan YKPP (Yayasan Kesejahteraan Perumahan dan Pendidikan) bagi anggota Polri/PNS;  
(giat 3072, 3105/prog Dukma, prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4);
- b) Melaksanakan kerja sama dengan pengembang / developer tentang pengadaan perumahan ASABRI dan memberikan kemudahan terkait bantuan uang muka ASABRI;  
(giat 3072, 3105/prog Dukma, Profesionalisme SDM Polri/SP 4);
- c) meningkatkan

- c) meningkatkan pelayanan kesehatan promotif, preventif, deteksi, kuratif, rehabilitatif secara paliatif.  
(giat 3072/prog Dukma/SP 4);
  - d) melaksanakan pemenuhan hak-hak personel secara layak dan pelatihan kewirausahaan menjelang purna tugas;  
(giat 3105/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4);
  - e) optimalisasi aplikasi e.Yankes terkait kecepatan informasi dan pelayanan bagi;  
(giat 3072/prog Dukma/SP 4);
  - g) optimalisasi penyelesaian anggota yang bermasalah melalui program BERITA (Badan Penyelesaian Permasalahan Anggota Polri);  
(giat 3105, 3107/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4);
  - h) pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL);  
(giat 3072, 5062/prog Dukma, prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 4);
  - i) peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik pada tingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparaturnya Polri dan masyarakat umum;  
(giat 3072, 5062/prog Dukma, prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/ SP 4).
- e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“pemenuhan sarana prasarana, almatsus polri dan fasilitas konstruksi Polres Sampang yg modern dan memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi berbasis Minimum Esensial Police Equipment (MEPE)”**, yaitu:
- 1) pemenuhan Sarpras dan perlengkapan Almatsus Polres Sampang yang modern sesuai dengan teknologi terkini guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melakukan inventarisasi kondisi riil Alparkam dan Almatsus Polres Sampang;  
(giat 5060, 5051/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5);
  - b) melakukan evaluasi pengusulan pemenuhan kebutuhan perlengkapan Alparkam, Almatsus dan infrastruktur TIK Polres Sampang dengan skala prioritas;

(giat 5059/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri /SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 10, renaksi 37, 38);

- c) mendistribusikan Alpalkam dan Almatsus sesuai dengan peruntukannya;  
(giat 5059, 3084/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/IKP4 /PPK prog 4, 11, giat 9, 10, 37, 40 renaksi 34, 37, 38, 45, 115, 135, 144);
  - d) melakukan rekapitulasi pendistribusian materiil logistik dan infrastruktur TIK;  
(giat 5059/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/ IKP 4/PPK prog 4, giat 10,renaksi 37, 38);
  - e) melakukan usulan penghapusan Almatsus dan infrastruktur TIK yang kondisinya rusak berat;  
(giat 5059/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri /SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 9, 10, renaksi 34, 39, 40);
  - f) mengajukan rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus dari satker Polres Sampang.  
(giat 5059, 3084/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/ IKP4//PPK prog 4, giat 10, renaksi 39, 42).
  - g) pemenuhan Almatsus Polri yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan PPA, penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial, lawan insujensi dan pemeliharaan keamanan;  
(giat 3084, 5059, 5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5);
  - h) melanjutkan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polri (Min dan Maks);  
(giat 5059/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5);
  - i) meningkatkan layanan darurat/Hotline Kepolisian dengan nomor tunggal (110) dalam rangka merespon dengan cepat pengaduan masyarakat;  
(giat 5059/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5);
- f. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Meningkatkan Budaya Integritas, Akuntabilitas dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian”**, yaitu:

- 1) melanjutkan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis online;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a)memaksimalkan:

- a) memaksimalkan sistem Aplikasi E-Dumas Presisi dalam menindaklanjuti Dumas yang diterima dari masyarakat secara cepat dan tepat;  
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
  - b) memaksimalkan peranoperator untuk menindaklanjuti dan menjawab pengaduan yangmasuk melalui aplikasi dumas presisi;  
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
  - c) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online (WhatsApp, Facebook, Instagram dan email) dengan pengaduan dan pelayanan Itwasda, Bidpropam dan Bagwasidik Polda Jatim;  
(giat 3091, 3090, 3089, 3120/prog Dukma, prog Harkamtibmas/SP 6);
  - d) monitoring, evaluasi dan klarifikasi penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat secara terpadu;  
(giat 3091, 3089, 3090/prog Dukma/SP 6);
  - e) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor / korban dan tersangka;  
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
  - f) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar;  
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
  - g) mengoptimalkan dan mengIntegrasikan system penanganan pengaduan masyarakat melalui e-Dumasan;  
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
  - h) mengembangkan system pengawasan penyidikan secara elektronik (e-penyidikan);  
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
  - i) pemasangan perangkat keras (Hardware) dan perangkat lunak (Software) terkait rekrutmen Pendidikan pembentukan serta terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan publik;  
(giat 3091/prog Dukma/SP 6).
- 2) meningkatkan pencegahan korupsi di internal Polres Sampang;  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:



- a) Pelaksanaan asistensi pelaporan LHKPN pada aplikasi ELHKPN dan LHKASN pada aplikasi Siharka para wajib lapor di lingkungan Polres Sampang.  
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
  - b) Pelaksanaan Sosialisasi dan Asistensi Perkap Nomor 8 tahun 2017 tentang LHKPN, Perkap Nomor 9 tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri dan Perkap Nomor 10 tahun 2017 tentang Kepemilikan Barang Mewah Bagi Anggota Polri dan PNS Polri;  
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
  - c) meningkatkan kualitas dan kapabilitas APIP dalam upaya mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi;  
(giat 3091/prog Dukma /SP 6);
  - d) Meningkatkan pengawasan melekat terhadap anggota Polri yang memegang jabatan operasional atau pelaksana tugas operasional;  
(giat 3068, 3091/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 8/PPK prog 15, giat 48, renaksi 168,169);
  - e) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan korupsi;  
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
  - f) melaksanakan peningkatan pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan Polres Sampang secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;  
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
  - g) meningkatkan kualitas pemantauan tindak lanjut dari hasil pengawasan pengelolaan keuangan negara melalui pengimplementasian monitoring dan evaluasi dengan sistem informasi yang terintegrasi;  
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
  - h) melaksanakan supervisi dan asistensi terkait pengelolaan keuangan Negara di Polsek Jajaran.  
(giat 3091/prog Dukma/SP 6).
- 3) meningkatkan tatakelola manajemen keuangan, perencanaan dan penganggaran Polres Sampang yang efektif, efisien dan akuntabel;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a)menentukan

- a) menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan agar tidak salah sasaran;  
(giat 5051/prog Dukma/SP 6);
  - b) mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam memanfaatkan kekuatannya untuk meminimalkan kelemahannya guna meminimalisir kegagalan;  
(giat 5062/prog Dukma/SP 6);
  - c) melaksanakan proses perencanaan sesuai timeline yang ada dengan mematuhi peraturan yang berlaku, dengan memperhatikan output dan outcome untuk mencapai anggaran yang berbasis kinerja;  
(giat 5051/prog Dukma/SP 6);
  - d) meningkatkan sinergitas dalam menyusun produk perencanaan Polres Sampang guna mensinkronisasi pembangunan di Polres Sampang agar semakin berkualitas;  
(giat 5051/prog Dukma/SP 6);
  - e) melaksanakan dan meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri Semester dan Tahunan;  
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
  - f) melaksanakan Analisa dan Evaluasi setiap kegiatan baik dibidang operasional dan pembinaan, sebagai tolak ukur pelaksanaan tugas Kepolisian.  
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
- 4) Menata kelembagaan dan tata laksana Polsek serta penguatan struktur organisasi Polri yang efektif dan efisien;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) Melaksanakan pengkajian klasifikasi struktur organisasi Polres Sampang di tingkat kesatuan kewilayahan dengan mengoptimalkan pengimputan data dalam aplikasi SIK3);  
(giat 5052/prog Dukma/SP 6);
  - b) Mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan DSP disetiap Satker dengan melakukan kajian kelembagaan baik bidang pembinaan maupun operasional;  
(giat 5052/prog Dukma/SP 6).
- 5) meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri di lingkungan Polres Sampang;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) terus mendorong Satker berinovasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan pelayanan publik di wilayahnya.  
(giat 5053/prog Dukma/SP 6);

BAB IV.....

**BAB IV**  
**PROGRAM KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF**

**1. Program dan Kegiatan Polres Sampang TA. 2026**

a. program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

1) Tujuan:

Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2) Kegiatan:

- a) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- b) penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- c) penindakan tindak pidana umum;
- d) penindakan tindak pidana Narkoba;
- e) penindakan tindak pidana korupsi;
- f) penindakan tindak pidana Lalu Lintas.

b. program modernisasi Almatsus dan sarana prasarana Polri;

1) Tujuan:

Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi Almatsus dan sarana prasarana Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi bidang pembinaan dan operasional.

2) Kegiatan:

- a) dukungan manajemen dan teknis Sarpras.

c. program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;

1) Tujuan:

Terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi Kepolisian serta kerja sama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi, preemtif dan preventif.

2) Kegiatan:

- a) analisis keamanan;
- b) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik;

c) penvelenggara

- c) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi;
  - d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya;
  - e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara;
  - f) dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - g) pembinaan pelayanan fungsi Samapta;
  - h) penyelenggaraan pengamanan objek vital;
  - i) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas;
  - j) pembinaan potensi keamanan;
  - k) pembinaan operasional pemeliharaan keamanan;
  - l) pengendalian operasi kepolisian;
- e. program dukungan manajemen;
- 1) Tujuan:  

Terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian, sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi serta kerja sama lintas sektor.
  - 2) Kegiatan:
    - a) penerangan masyarakat;
    - b) dukungan pelayanan internal perkantoran Polri;
    - c) pertanggungjawaban profesi;
    - d) penyelenggaraan pengamanan internal Polri;
    - e) penegakan tata tertib dan disiplin Polri;
    - f) penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan;
    - g) kerjasama dan penyuluhan hukum;
    - h) reformasi birokrasi Polri;
    - i) manajemen anggaran;

## 2. Pagu Indikatif Polres Sampang TA 2026

- a. Kebutuhan Anggaran Polres Sampang T.A. 2026 sebesar **Rp. 67.505.131.000,-** (Enam Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Lima Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan rincian komposisi kebutuhan anggaran sebagai berikut:
  - 1) rincian Pagu Indikatif Polres Sampang T.A. 2026 per Jenis Belanja sebagai berikut:

a) Belanja

- a) Belanja Pegawai :  
Rp. 46.494.726.000,-;
  - b) Belanja Barang :  
Rp. 17.214.681.000,-;
  - c) Belanja Modal Bersumber SBSN :  
Rp. 3.795.724.000,-.
- 2) rincian Pagu Indikatif T.A. 2026 per sumber anggaran sebagai berikut:
- a) Rupiah Murni Rp. 64.587.682.000,-;
  - b) PNPB Rp. 2.917.449.000,-;
  - c) BLU Rp. 0,-;
- 3) Rincian Pagu Indikatif T.A. 2026 per Program sebagai berikut:
- a) Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Rp. 1.848.676.000,-;
  - b) Modernisasi Almitsus Dan Sarana Prasarana Polri Rp. 5.336.500.000,-;
  - c) Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Rp. 8.933.821.000,-;
  - d) Dukungan Manajemen Rp. 51.386.134.000,-.
- b. kegiatan yang berdasarkan usulan Pagu Indikatif Polres Sampang T.A. 2026 :
- 1) mengakomodir kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan termasuk tunjangan kinerja, pemenuhan *Intake* Polri tahun 2026, namun Pagu Indikatif ini belum termasuk untuk penambahan tunjangan kinerja sampai dengan 80%;
  - 2) mendukung kegiatan operasional anggaran perkantoran (antara lain: biaya pemeliharaan, BMP, pemeliharaan dan perawatan *Command Center*, kebutuhan *werving* Diktuk daya dan jasa serta keperluan perkantoran);
  - 4) kegiatan fungsi teknis kepolisian, berupa: deteksi potensi gangguan keamanan, pencegahan dan penanggulangan keamanan, pembinaan pelayanan dan perlindungan masyarakat, korupsi, Narkoba perdagangan orang, keamanan dalam negeri, Kamtibmas, keamanan laut, kejahatan siber dan penegakan hukum lainnya dan pengamanan tahapan Pemilu 2024;
  - 5) mendukung penguatan sarana prasarana dalam rangka peningkatan profesionalisme SDM Polres Sampang, meningkatkan pelayanan publik Polres Sampang, penanganan gejala/konflik sosial, penanganan kasus menonjol, separatisme/KKB, terorisme, berita hoaks dan penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan

terhadap kekayaan negara, penanganan peristiwa yang berimplikasi kontinjensi, pemenuhan fasilitas Polri dan pemenuhan pembangunan perumahan dan kesehatan bagi personel Polres Sampang;

- 6) melaksanakan pelatihan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kapabilitas personel Polri, baik di bidang fungsi pembinaan maupun operasional agar semakin Promoter dan Presisi;
- 7) meningkatkan kegiatan preemtif dan preventif secara maksimal dengan mengoptimalkan petugas Bhabinkamtibmas melalui strategi Polmas dalam menghadapi ancaman gangguan kamtibmas;
- 8) meningkatkan kegiatan keamanan laut pada poros maritim dengan memperkuat satuan Polair baik di tingkat Polres Sampang maupun kewilayahan;
- 9) meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli pada tempat-tempat dan jam rawan gangguan Kamtibmas serta di wilayah Polres Sampang dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional;
- 10) melaksanakan sosialisasi, penyusunan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Polres Sampang serta pemberian advokasi terhadap institusi Polri, anggota Polres Sampang maupun keluarga Polres Sampang;
- 11) Program Prioritas Kapolri adalah arah kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Polri dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya untuk mewujudkan Polri yang Presisi-Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan Program Transformasi menuju Polri yang Presisi Terdiri dari 4 Transformasi Utama, 16 Program Prioritas, dan 51 Kegiatan Prioritas. Berikut ini ringkasan Program Prioritas Kapolri (Presisi) yang dicanangkan oleh Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. sejak awal kepemimpinannya:

- a) Transformasi Organisasi Tujuan: Mewujudkan struktur organisasi Polri yang lebih efektif, efisien, dan adaptif.

Program Prioritas:

- (1) Penataan kelembagaan Polri agar lebih ramping dan modern.
- (2) Penguatan kelembagaan Polsek dan Polres agar lebih responsif terhadap masyarakat.
- (3) Optimalisasi pelayanan satu atap di bidang pelayanan publik Polri.

- b) Transformasi Operasional Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum yang humanis.

Program Prioritas:

(1)Pemanta~

- (1) Pemantapan harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat).
  - (2) Penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan.
  - (3) Penguatan Polri dalam penanggulangan kejahatan berbasis teknologi (cybercrime, kejahatan transnasional, dll).
  - (4) Optimalisasi pelayanan publik berbasis IT (digitalisasi pelayanan).
- c) Transformasi Pelayanan Publik Tujuan: Memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan bebas dari pungli.

Program Prioritas:

- (1) Membangun sistem pelayanan berbasis digital (SIM online, SKCK online, e-Tilang, dll).
  - (2) Penguatan fungsi humas dan komunikasi publik yang transparan.
  - (3) Penguatan kerja sama dengan instansi lain untuk pelayanan masyarakat terpadu.
- d) Transformasi Pengawasan Tujuan: Meningkatkan integritas dan akuntabilitas internal Polri.

Program Prioritas:

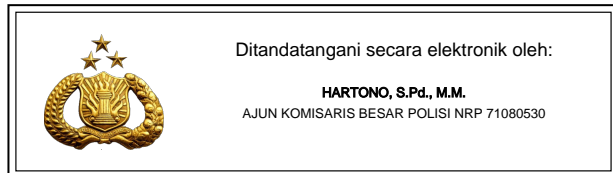
1. Penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi (e-Was).
  2. Peningkatan kualitas SDM pengawas internal (Itwasum, Propam).
  3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
  4. Peningkatan penegakan kode etik dan disiplin anggota Polri.
- 13) Fokus Utama Program Presisi Saat Ini (2024–2025) Beberapa fokus lanjutan yang masih menjadi program prioritas Kapolri saat ini antara lain:
- Penguatan transformasi digital Polri (digitalisasi pelayanan dan manajemen internal).
  - Peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri.
  - Penguatan sinergitas TNI-Polri dan instansi terkait.
  - Peningkatan penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan.
  - Percepatan respons Polri terhadap aduan masyarakat berbasis aplikasi.
  - Pemberantasan narkoba, judi online, dan kejahatan siber.
  - Penanganan konflik sosial, radikalisme, dan intoleransi.
  - Stabilisasi politik dan keamanan nasional, terutama menjelang/pasca pemilu.

## **BAB V** **PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja (Renja) Polres Sampang tahun 2026 ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman bagi Polres Sampang beserta jajarannya sebagai acuan dalam rangka penyusunan Pagu Definitif TA 2026 Polres Sampang sehingga dapat terwujud kesamaan persepsi dan tindakan untuk mencapai sasaran tugas secara optimal .

Ditetapkan di: Sampang  
pada tanggal: 29 Oktober 2025

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMPANG POLDA JATIM



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TIMUR  
RESOR SAMPANG

---



**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)  
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR  
RESOR SAMPANG  
TAHUN ANGGARAN 2026**


RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) POLRES SAMPANG TAHUN 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	KET
I	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sampang yang terkendali, melalui kepolisian yang berintegritas, modern, dan akuntabel	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sampang	3,03	
1	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sampang yang Responsif dan Prediktif	Indeks Harkamtibmas Polres Sampang	3,17	
2	Penegakan Hukum Yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan di wilayah Hukum Polres Sampang	Indeks Gakkum Polres Sampang	3,98	
3	Pengembangan dan pengelolaan SDM Polres Sampang yang adaptif, Kompeten dan Berintegritas secara Terpadu dan Optimal	Indeks Human Capital	3,54	
		1. indeks profesionalitas SDM Polres Sampang	70,84	
4	Infrastruktur Strategis Polres Sampang yang Berdaya Guna dan Modern	Indeks Infrastruktur Strategis	2.60	
		1. Tingkat Pemenuhan <i>Minimum Essential Police Equipment (MEPE)</i> Operasional	52	
5	Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel di lingkungan Polres Sampang.	Indeks Organization Capital	3.32	
		1. Nilai SAKIP Polres Sampang	68.64	
		2. Nilai Kinerja Anggaran	90.28	
		3. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	74.86	
		4. Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang Dihadapi Polres Sampang	82	

Ditetapkan di: Sampang

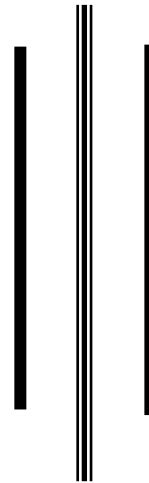
Pada tanggal: 29 Oktober 2025

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMPANG POLDA JATIM

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
  
**HARTONO, S.Pd., M.M.**  
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71080530



**RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA  
( RENJA KL )  
T.A. 2026**



Sampang, 29 Oktober 2025

**FORMULIR 1**  
**PENJELASAN UMUM**  
**RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA ( RENJA KL )**  
**T.A. 2026**

**REKAP 1: K/L**  
**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

- 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEPOLISIAN RESOR SAMPANG
- 2. VISI** : Terwujudnya keamanan dan Ketertiban di Seluruh Daerah Hukum Polres Sampang
- 3. MISI** : Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat di Lingkungan Polres Sampang
- 4. PRIORITAS NASIONAL**

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2026 (RIBU)
02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	0,0
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	0,0
<b>Total</b>		0,0

**5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L**

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sampang yang Responsif dan Prediktif		8.933.821
01.01	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sampang yang Responsif dan Prediktif	3,17	
02	Penegakan Hukum Yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan di wilayah Hukum Polres Sampang		1.848.676
02.01	Indeks Gakkum Polres Sampang	3,98	
03	Pengembangan dan pengelolaan SDM Polres Sampang yang adaptif, Kompeten dan Berintegritas secara Terpadu dan Optimal		5.336.500
03.01	Indeks Human Capital	3,54	
03.02	1. indeks profesionalitas SDM Polres Sampang	70,84	
04	Terwujudnya tata kelola Infrastruktur Strategis Polres Sampang yang Berdaya Guna dan Modern yang bersih, terbuka, dan melayani		51.386.134
04.01	Indeks Infrastruktur Strategis	2.60	
04.02	1. Tingkat Pemenuhan <i>Minimum Essential Police Equipment (MEPE)</i> Operasional	52	

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
05	Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel di lingkungan Polres Sampang.		
05.01	Indeks Organization Capital	3.32	
05.02	1. Nilai SAKIP PolresSampang	68.64	
05.03	2. Nilai Kinerja Anggaran	90.28	
05.04	3. Persentase Penanganan PengaduanMasyarakat	74.86	
05.05	4. Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang Dihadapi Polres Sampang	82	
<b>Total</b>			67.505.131

#### 6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
		RM	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
060.BI	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	1.787.113	61.563	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.848.676
060.BP	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	3.795.724	1.540.776	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.336.500
060.BQ	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	7.655.191	1.278.630	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.933.821
060.WA	Program Dukungan Manajemen	51.386.134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51.386.134
<b>Total</b>		64.624.162	2.880.969	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67.505.131

Sampang, Oktober 2025

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMPANG  
KABAGREN

ARIES DWIYANTO, S.H.

KOMISARIS POLISI NPT 2050014 Besar  
Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dan dapat dibuktikan keasliannya melalui pemindaian QR di samping



**FORMULIR 2**  
**PENJELASAN PER PROGRAM**  
**RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA ( RENJA KL )**  
**T.A. 2026**

**REKAP 2: PROGRAM K/L**  
**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN RESOR SAMPANG  
 2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 02 - Penegakkan hukum secara berkeadilan  
 3. PROGRAM : Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana  
 4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2026 (RIBU)
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	0,0
07.05	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	0,0
<b>Total</b>		0,0

**5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)**

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	terciptanya keadilan penegakkan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi		1.848.676
01.01	1. clearance rate kejahatan konvensional	62.30	
01.02	2. clearance rate kejahatan transnasional	81	
01.03	3. clearance rate kejahatan terhadap perempuan dan anak	81	
01.04	4. clearance rate kejahatan kekayaan negara	71	
01.05	5. clearance rate tindak pidana lintas	81	
01.06	6. clearance rate tindak pidana di wilayah perairan Polres Sampang	77	
01.07	7. tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polres Sampang (aspek Gakkum PolresSampang)	58.45	
<b>Total</b>			1.848.676

**6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM**

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	layanan penegakkan hukum oleh Polri	1.848.676
01.01	Indeks Penegakkan hukum Polri	
<b>Total</b>		1.848.67

## 7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
		RM	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3137	Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	386.935	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	386.935
3140	Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	24.805	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24.805
3142	Penindakan Tindak Pidana Umum	702.734	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	702.734
3144	Penindakan Tindak Pidana Narkoba	484.607	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	484.607
3146	Penindakan Tindak Pidana Korupsi	158.208	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158.208
4343	Penindakan Tindak Pidana Lalu Lintas	0,0	61.563	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61.563
8050	Penindakan Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang	29.824	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29.824
<b>Total</b>		<b>1.848.676</b>	<b>93.889,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.848.676</b>

Sampang, Oktober 2025

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMPANG  
KABAGREN


ARIES DWIYANTO, S.H.  
KOMISARIS POLISI NRP 68050014

**REKAP 2: PROGRAM K/L**  
**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN RESOR SAMPANG  
 2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 04 - Modernisasi Teknologi  
 3. PROGRAM : Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri  
 4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2026 (RIBU)
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	0,0
07.05	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	0,0
<b>Total</b>		0,0

**5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)**

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	terselenggaranya operasional Polri yang optimal dalam pelaksanaan harkamtibmas dan gakkum serta Layanan Internal		5.336.500
01.01	persentase Counter Opini Negatif	90	
<b>Total</b>			5.336.500

**6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM**

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Almatsus dan Sarpras	5.336.500
01.01	persentase pemebuhan Almatsus dan Sarpras	
<b>Total</b>		5.336.500

**7. KEGIATAN DAN PENDANAAN**

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
		RM	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	0,0	306.002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306.002

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
		RM	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
5061	Pengembangan Perbekalan Umum	0,0	1.234.774	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.234.774
5062	Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.795.724	0,0	3.795.724
<b>Total</b>		3.795.724	1.540.776	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.336.500

Sampang, Oktober 2025

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMPANG  
KABAGREN

ARIES DWIYANTO, S.H.  
KOMISARIS POLISI NRP 68050014

**REKAP 2: PROGRAM K/L**  
**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN RESOR SAMPANG  
 2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 01 - Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat  
 3. PROGRAM : Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat  
 4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2026 (RIBU)
02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	0,0
02.04	Pembangunan Wilayah Sampang	0,0
<b>Total</b>		0,0

**5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)**

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sampang yang Responsif dan Prediktif		8.933.821
01.01	Indeks Harkamtibmas Polres Sampang	3,17 %	
<b>Total</b>			8.933.821

**6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM**

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	layanan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	8.933.821
01.01	Indeks Harkamtibmas	
<b>Total</b>		8.933.821

**7. KEGIATAN DAN PENDANAAN**

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3112	Analisis Keamanan	23.760	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23.760
3114	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik	145.514	1.295	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146.809

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dan dapat dibuktikan keasliannya melalui pemindaian QR di samping



KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3115	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi	170.944	1.295	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172.239
3116	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya	149.587	1.295	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.882
3117	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara	374.202	1.665	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375.867
3128	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	2.881.759	142.600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.024.359
3130	Penyelenggaraan Fungsi Samapta Polri	680.400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	680.400
3131	Penyelenggaraan Fungsi Pamobvit Polri	0,0	304.560	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304.560
3133	Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lintas	0,0	825.920	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	825.920
5076	Pembinaan Potensi Keamanan	2.646.293	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.646.293
5077	Pembinaan Operasional Pemeliharaan Keamanan	70.230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70.230
5079	Pembinaan Operasi Kepolisian	512.502										512.502
<b>Total</b>		<b>7.655.191</b>	<b>1.278.630</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.933.821</b>

Sampang, Oktober 2025  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMPANG  
KABAGREN

ARIES DWIYANTO, S.H.  
KOMISARIS POLISI NRP 68050014

**REKAP 2: PROGRAM K/L**  
**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN RESOR SAMPANG  
 2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 05 - Sistem pengawasan yang akuntabel, Bersih Terbuka, dan Melayani  
 3. PROGRAM : Program Dukungan Manajemen  
 4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2026 (RIBU)
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	0,0
07.05	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	0,0
<b>Total</b>		0,0

**5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)**

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel di lingkungan Polres Sampang.		51.386.134
01.01	Indeks Organization Capital	3.32	
01.02	1. Nilai SAKIP PolresSampang	68.64	
01.03	2. Nilai Kinerja Anggaran	90.28	
01.04	3. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	74.86	
01.05	4. Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang Dihadapi Polres Sampang	82	
<b>Total</b>			51.386.134

**6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM**

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	layanan kepada internal Polri	51.386.134
01.01	Jumlah layanan yang di berikan sesuai SOP	
<b>Total</b>		51.386.134

**7. KEGIATAN DAN PENDANAAN**

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri	4.752.625	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.752.625
3088	Pertanggungjawaban Profesi	11.423	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.423
3089	Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri	12.392	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.392
3090	Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri	13.860	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.860
3091	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan	30.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000
3154	Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum	10.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000
3155	Kerjasama dan Penyuluhan Hukum	20.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.000
5053	Reformasi Birokrasi Polri	31.924	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31.924
5054	Manajemen Anggaran	9.184	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.184
<b>Total</b>		51.386.134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46.598.026,0

Sampang, Oktober 2025

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMPANG  
KABAGREN

ARIES DWIYANTO, S.H.  
KOMISARIS POLISI NRP 68050014

